

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI ACEH SINGKIL
(STUDI KASUS TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI
POLITIK PASANGAN DULMUSRID – SAZALI PADA
PEMILIHAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2017)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi*

Oleh :

RAHMAWAN CIBRO

NIM:1620040012



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

Persetujuan Pembimbing

Nama : Rahmawan Cibro

Nomor Pokok Mahasiswa : 1620040012

Program Studi / Konsentrasi : Magister Ilmu Komunikasi

Judul Tesis : Komunikasi : **Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Aceh Singkil (Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dulmusrid – Sazali Pada Pemilihan Bupati – Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017).**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Tesis,

Medan, Oktober 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Yan Hendra, M.Si

Pembimbing II

Ribut Priadi, S.Sos, M.I.Kom

PENGESAHAN

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH SINGKIL (STUDI KASUS TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN DULMUSRID –SAZALI PADA PEMILIHAN BUPATI –WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2017)

RAHMAWAN CIBRO

1620040012

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

“ Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom), Pada Hari Jum’at Tanggal 19 Oktober 2018 ”

Panitia Penguji

- | | |
|---|--------|
| 1. <u>Hj.Rahmanita Ginting , M.Sc., Ph.D.</u> Ketua | 1..... |
| 2. <u>Dr. Yan Hendra, M.Si.</u> Anggota | 2..... |
| 3. <u>Ribut Priadi, S.Sos.,M.I.Kom.</u> Anggota | 3..... |
| 4. <u>Prof. Syukur Kholil Dalimunthe, M.A.,Ph.D.</u> Anggota | 4..... |
| 5. <u>Dr. Rudianto, M.Si.</u> Anggota | 5..... |

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Aceh Singkil (Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dulmusrid Dan Sazali Pada Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Oktober
2018
Penulis,

RAHMAWAN CIBRO
162004001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAWAN CIBRO
NPM : 1620040012
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Aceh Singkil
(Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dulmusrid Dan Sazali Pada Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : Oktober
2018
Yang Menyatakan,

(RAHMAWAN CIBRO)

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH SINGKIL (STUDI KASUS TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN DULMUSRID – SAZALI PADA PEMILIHAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2017)

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakanginya pentingnya strategi komunikasi politik untuk pemenangan dalam pemilihan kepala daerah Aceh Singkil .tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi politik dalam memenangkan pasangan bupati dan wakil bupati.teori yang dipakai dalam penelitian ini teori Strategi komunikasi politik dan uraian-uraian teori pendukung lain nya tentang strategi komunikasi politik .metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.narasumber penelitian ini tim pemenangan dan bupati.teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan waawancara dengan narasumber dan juga melalui tinjauan pustaka.hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik pasangan dulmusrid-sazali.dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dari komponen komunikasi yakni komunikator,isi pesan, media,komunikan dan umpan balik.kemudian melalui pertimbangan komunikasi tersebut.strategi komunikasi memberi kemenangan pasangan dulmusrid-sazali dalam pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati tahun 2017.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi Politik,Komunikasi Politik.

POLITICAL COMMUNICATION STRATEGY IN REGIONAL HEAD
SELECTION IN ACEH SINGKIL (CASE STUDY ON POLITICAL
COMMUNICATION STRATEGY OF DULMUSRID PARTNERS - SAZALI IN
THE 2017 ELECTION OF ACEH ACEH REGENCY)

ABSTRACT

This study in the background behind the importance of political communication strategies for winning in the Aceh Singkil regional head election. The purpose of this study is to find out the political communication strategy in winning the pair of regents and deputy regents. The theory used in this research is political communication strategy theory and supporting theory descriptions. other about political communication strategies. The research method used was descriptive qualitative. The source of the research was the winning team and the regent. Data collection techniques used were interviews with resource persons and also through literature review. The results of this study showed that the political communication strategy of the dulmusrid-sazali pair was carried out by considering the characteristics of the communication component is the communicator, message content, media, communicant and feedback. Then through these communication considerations. the communication strategy gives the pair the victory of dulmusrid-sazali in the 2017 regional head and vice regent election.

Keywords: Political Communication Strategy, Political Communication.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga atas perkenanNya jua, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dan selanjutnya memaparkan dihadapan Dewan “Sidang Tesis” yang mulia. Salam dan taslim juga peneliti sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena syafa’atnyalah segala amal perbuatan kita insya Allah dapat diterima sebagai bentuk ibadah oleh Allah SWT.

Terima kasih yang tak terhingga secara khusus peneliti sampaikan kepada kedua orangtua Ayahanda H.Jhoni Cibro dan Ibunda Hj.Rumadan Tumangger,S.H. adik-adik, sahabat-sahabat dan teman-temanku tercinta, yang telah memberikan dorongan serta semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian dengan judul Tesis “ Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Aceh Singkil (Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dulmusrid Dan Sazali Pada Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar S-2 (Strata Dua) / Magister pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dapat diselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan terimakasih, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M. AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri M.AP. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Ibu Hj. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph.D Selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Bapak Dr. Yan Hendra M.Si Selaku Pembimbing I, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk dan motivasi serta mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini dan juga berkenan menjadi rekan diskusi yang baik, sabar dan komunikatif.
5. Bapak Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom selaku Pembimbing II, yang telah memberikan koreksi dan saran sehingga membuat tesis ini menjadi lebih baik.
6. Segenap civitas akademik yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian sampai dengan pelaksanaan “Sidang Tesis” ini.

Selanjutnya Peneliti mohon maaf dari semua pihak jika dalam penyelesaian penelitian ini terdapat sikap dan tingkah laku peneliti yang tanpa disengaja kurang berkenan dihati.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Medan, Oktober 2018

Rahmawan Cibro

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3..... | Tujuan |
| n Penelitian..... | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1.Strategi Komunikasi Politik..... | 5 |
| 2.2.1.Strategi Komunikasi | 6 |
| 2.2.Ideologi Sebagai Pondasi..... | 10 |
| 2.2.1.Jenis-Jenis Ideologi..... | 12 |
| 2.2.2.Ideologi Nasionalis..... | 13 |
| 2.2.3.Idiologi Agama..... | 15 |
| 2.2.4.Penyebaran Ideologi Partai Politik..... | 17 |
| 2.3. Jenis –Jenis Strategi Komunikasi Politik..... | 18 |

| | |
|---|----|
| 2.3.1.Strategi Ofensif..... | 20 |
| 2.3.2.Strategi Perluasan Pasar..... | 21 |
| 2.3.3.Strategi Menembus Pasar..... | 21 |
| 2.3.4.Strategi Defensif..... | 21 |
| 2.3.5.Strategi Mempertahankan Pasar..... | 21 |
| 2.3.6.Strategi Menyerahkan Pasar..... | 22 |
| 2.4.Pemilihan Kepala Daerah SecaraLangsung..... | 23 |
| 2.5.Definisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung.... | 23 |
| 2.6.Tujuan Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung..... | 27 |
| 2.7.Penetapan Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilukada..... | 28 |
| 2.8.Partai Politik..... | 30 |
| 2.9.Merumuskan Misi..... | 31 |
| 2.10.Penilaian Situasional Dan Evaluasi..... | 31 |
| 2.10.1.Perumusan Sub-Strategi..... | 32 |
| 2.10.2.Perumusan Sasaran..... | 32 |
| 2.10.3.Target Image (Citra yang diinginkan)..... | 33 |
| 2.10.4.Kelompok-KelompokTarget..... | 34 |
| 2.10.5.Pesan Kelompok Target..... | 34 |
| 2.10.6.Instrumen-Instrumen Kunci..... | 36 |
| 2.10.7.Implementasi Strategi..... | 37 |
| 2.10.8.Pengendalian Strategi..... | 38 |
| 2.11.Penelitian Terdahulu..... | 39 |
| 2.12.Pesan Politik..... | 40 |
| 2.12.1Sasaran Atau Target Politik..... | 41 |
| 2.12.2.Strategi Menembus Pasar..... | 41 |
| 2.12.3Pemasaran Politik..... | 41 |
| 2.13.Pembagian Ke Dalam Daerah – Daerah..... | 42 |
| 2.13.1.Bersaing Dalam Pemilu..... | 43 |
| 2.13.2.Pemberian Suara..... | 44 |
| 2.13.3.Rumus Penghitungan Suara..... | 45 |
| 2.14.Model Komunikasi..... | 46 |

| | |
|--|-----------|
| 2.15. Bagian Proses Komunikasi..... | 47 |
| 2.16. Kerangka Konsep..... | 48 |
| 2.17. Manajemen Strategis..... | 49 |
| 2.17.1. Unsur Komunikasi Politik..... | 51 |
| 2.17.2. Komunikator Dan Komunikan..... | 51 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 55 |
| 3.1. Metode Penelitian..... | 55 |
| 3.2. Jenis Penelitian..... | 56 |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data..... | 57 |
| 3.4. Subjek Penelitian..... | 58 |
| 3.5. Teknik Penentuan Informan..... | 58 |
| 3.6. Instrumen Penelitian..... | 59 |
| 3.7. Teknik Analisis Data..... | 60 |
| 3.7.1. Paradigma Penelitian Dan Pemaknaannya..... | 61 |
| 3.7.2. Teknik Cuplikan (Sampling)..... | 62 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 64 |
| 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 66 |
| 4.1.1. Dataran..... | 65 |
| 4.1.2. Perbukitan..... | 65 |
| 4.1.3. Iklim..... | 66 |
| 4.1.4. Keadaan Penduduk..... | 67 |
| 4.2. Kondisi Pemerintahan Daerah Kab. Aceh Singkil..... | 70 |
| 4.3. Perencanaan dan strategi komunikasi tim pemenangan..... | 73 |
| 4.3.1. Karakteristik Sosial..... | 73 |
| 4.3.2. Legal..... | 73 |
| 4.3.3. Objek Politik..... | 74 |
| 4.3.4. Dukungan Modal..... | 74 |
| 4.4. Struktur Tim Pemenangan Dulmusrid-Sazali Paslon Bupati | |

| | |
|--|-----------|
| Dan Wakil Bupati Kabupaten Singkil..... | 76 |
| 4.5.Misi Dan Visi Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Dulmusrid- Sazali 2017-2022 | 77 |
| 4.6.Hasil Wawancara..... | 81 |
| 4.6.1.Berikut dikembangkan hasil wawancara kepada narasumber I yulihardin (Ketua Tim Pemenangan)..... | 81 |
| 4.6.2.Berikut dikembangkan hasil wawancara kepada Narasumber II Dulmusrid (Bupati Kab.Aceh Singkil.... | 86 |
| 4.7.Pembahasan Hasil Penelitian..... | 91 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | 93 |
| 5.1. Simpulan..... | 93 |
| 5.2. Saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 95 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 1). Partai politik berfungsi sebagai saluran aspirasi warga negara. Peran partai politik memperoleh momentumnya pada saat Pemilu, ketika warga negara memilih para anggota legislatif yang akan membawa aspirasi mereka. menjelaskan ada dua model rekrutmen legislatif yaitu seleksi yang ditentukan oleh elit partai dan model pemilihan pendahuluan (konversi partai).

Cikal bakal Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung yang telah diselenggarakan di berbagai daerah, kiranya mempunyai referensi yang beragam. Lahirnya pemilihan umum kepala daerah secara langsung itu juga di latar belakang oleh berbagai ketidakpuasan dan penyimpangan didalam proses pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan para wakil rakyat di daerah.

Pemilihan umum kepala daerah benar-benar di akomodasikan setelah lahir Undang-Undang No. 32 Tahun 2017 tentang pemerintahan daerah disusul dengan

keluarnya peraturan Perundang-Undangan No. 6 tahun 2017 adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Berdasarkan UUD 1945 seperti yang telah

diamanatkan pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dimana kehendak rakyat akan diwujudkan secara langsung dengan memilih pemimpinnya pada tingkat provinsi yaitu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan pada tingkat kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2017 digelar sebuah pesta akbar demokrasi, yakni pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Aceh Singkil. dalam pemilukada tersebut terjaring empat kandidat yang bertarung dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di kabupaten aceh singkil tahun 2017.

Berikut adalah daftar calon bupati dan wakil bupati kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang ikut dalam proses pemilihan umum kepala daerah tahun ini:

1. H. Safriadi, SH – Sariman, SP

Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Kab. Aceh Singkil Dengan Nomor Urut 1 Diusung Partai PDI, NASDEM, PKPI, DEMOKRAT & PPP.

2. Yakarim M – Roesman Hasmy

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Aceh Singkil Dengan Nomor Urut 2 Diusung Partai PA, GERINDRA & PKS.

3. Dulmusrid – H. Sazali, S.Sos

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Aceh Singkil Dengan Nomor Urut 3 Diusung Partai PAN, PKB Dan GOLKAR.

4. Putra Ariyanto – Hendri Syahputra

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Aceh Singkil Dengan Nomor Urut 4 Diusung Partai HANURA, PBB, PDA.

Dari ke empat pasangan tersebut ada tiga kandidat yang paling diunggulkan dapat memenangkan pemilukada kabupaten Aceh Singkil. Dari hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan februari 2017, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 1.1.1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

| No | Nama | Perolehan suara | Persentase |
|----|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | H. Safriadi, SH dan Sariman, SP | 23.401 suara | 38,66 % |
| 2 | Yakarim M dan Roesman Hasmy | 8.673 suara | 14,33 % |
| 3 | Dulmusrid dan H. Sazali, S.Sos | 25.886 suara | 42,77 % |
| 4 | Putra Ariyanto dan Hendri Syahputra | 2.568 suara | 4,24 % |
| | Jumlah | 60.528 suara | 100 % |

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) 25-5-2017

Pada penelitian ini, peneliti hendak mengetahui mengenai Strategi Komunikasi Politik yang diterapkan oleh Tim pemenangan Dulmusrid - Sazali. Dalam artian bahwa, walaupun tidak dapat dipungkiri yang akan berkompetisi untuk memenangkan pemilukada tersebut adalah para kandidat, tetapi peneliti tidak mengarah pada strategi khusus yang digunakan para kandidat calon kepala daerah dalam sebuah partai tertentu melainkan terfokus pada strategi umum yang dimiliki Tim Pemenangan para calon kepala daerah menuju pemilukada untuk kemenangan tersebut secara keseluruhan dimana strategi-strategi ini nantinya bisa saja diadopsi oleh para kandidat calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik.

Kabupaten Aceh Singkil menjadi fokus atau unit analisis dari peneliti dengan pertimbangan bahwa kabupaten aceh singkil ini telah berhasil disetiap pemilihan baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilukada

Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai. “ Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Aceh Singkil (Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dulmusrid –Sazali Pada Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017) ”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Strategi Komunikasi Poltik Tim Pemenangan Pasangan calon kepala daerah Dulmusrid -Sazali di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik tim pemenangan pasangan bupati dan wakil bupati aceh singkil Dulmusrid dan Sazali.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah uraian yang bersifat teoritis pada kajian ilmu komunikasi bidang komunikasi politik khususnya tentang komunikasi politik dalam pemilihan kepala daerah di aceh singkil.

B. Manfaat Akademis.

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan rujukan mengenai komunikasi politik.

C. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada berbagai pihak, khususnya tim pemenangan pasangan kepala daerah dalam menyusun strategi komunikasi politik untuk memenangkan pemilu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Strategi Komunikasi Politik

Dalam kajian politik, sangat jarang ditemukan batasan definisi dari istilah strategi yang dikeluarkan oleh pakar-pakar politik, sehingga kita terkadang mengalami kesulitan dalam memisahkan antara pengertian strategi dengan pengertian taktik, karena secara luas pengertian kedua istilah ini adalah mengarah pada sebuah seni dalam menggunakan 'kekuatan bersenjata' dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan.

Konsep strategi militer seringkali diadaptasi dalam dunia bisnis, misalnya konsep Sun Tzu, Hannibal dan Carl von Clausewitz. Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi untuk menghadapi berbagai situasi (Tjiptono, 1997).

Strategi telah di definisikan dalam beragam cara oleh banyak peneliti (dalam Triton, 2007: 5-6) diantaranya :

1. Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumberdaya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini (Chandler,1962).
2. Strategi adalah arah dan cakupan organisasi secara ideal untuk jangka panjang, yang menyesuaikan sumberdaya nya dengan lingkungan yang berubah dan secara khusus, dengan pasarnya, dengan pelanggan, dan kliennya untuk memenuhi harapan stakeholder (Jhonson dan Scholes, 1993).

Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi atau perusahaan (Tjiptono, 1997). Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. (Rangkuti, 2006:3).

Dengan berdasarkan pengertian diatas ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah suatu perencanaan taktikal untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif, dan sinergis yang secara berkelanjutan dijadikan sebagai pedoman dan panutan serta pengarah dan perspektif jangka panjang yang ideal dari individu atau organisasi untuk menunjang keunggulan bersaing dalam mencapai dan mempertahankan posisi strategis.

2.1.1. Strategi Komunikasi

Strategi politik adalah bagian dari demokrasi. Strategi politik merupakan instrument yang sah dimana kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran tujuannya kepada masyarakat. Strategi politik mendapatkan legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah pondasi kebebasan individu. Strategi politik adalah suatu usaha yang terkelola, terorganisir untuk mengikhtiarkan orang dicalonkan, dipilih, atau dipilih kembali dalam sebuah jabatan resmi.

Menurut (*Arnold Steinberg, 1974*) Strategi politik adalah cara yang digunakan para warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan mereka. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa strategi politik merupakan salah satu tahapan yang cukup menentukan hasil dalam sebuah pemilihan, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.

Setiap strategi politik adalah usaha hubungan masyarakat yang pada hakekatnya sama yakni membujuk sejumlah pemberi suara yang sudah terdaftar untuk mendukung calon. Berorientasi pada hubungan masyarakat, berusaha merangsang perhatian orang kepada sang calon, strategi politik coba meningkatkan identifikasi dan citra sang calon di antara kelompok pemberi suara, menyebar luaskan pandangan sang calon tentang berbagai masalah penting, dan mendorong para pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon.

Karakteristik yang mendefenisikan strategi politik telah dikemukakan, tetapi kita perlu menaruh perhatian khusus pada fakta bahwa strategi politik

bersangkut paut dengan perilaku yang cukup dilembagakan. Strategi politik seringkali menyangkut soal pengarahannya, pemerkuatan, dan penggerakan kecenderungan yang ada ke arah tujuan yang diperkenankan secara sosial seperti pemungutan suara dalam sebuah pemilihan.

kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum, diselenggarakan di seluruh daerah yang melaksanakan pemilihan, kegiatan dilaksanakan oleh tim pemenangan yang dibentuk oleh pasangan calon bersama partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung pasangan calon.

Dalam proses pemilihan umum kepala daerah, strategi politik bertolak dari konsep makna (*meanings*). Bahwa pada dasarnya strategi politik diartikan dari sebuah rangkaian aktivitas yang terencana, strategi dan taktis, untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih dan membentuk/menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih. Selain itu, strategi politik dijadikan sebagai alat untuk memasarkan ide-ide utama setiap pasangan calon atau disebut juga produk politik kepada masyarakat, produk yang peneliti maksud disini adalah produk politik yang meliputi :

Policy adalah tawaran program kerja jika pasangan calon tersebut kelak terpilih.

Policy merupakan solusi yang ditawarkan kontestan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan berdasarkan isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih.

Policy yang efektif harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

(1) Menarik perhatian.

(2) Mudah terserap pemilih.

(3) Atribut.

Person adalah kandidat yang akan dipilih melalui pemilu, Kualitas person dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni :

(1) Kualitas Instrumental.

(2) Dimensi simbolis dan fenotipe optik.

(3) dimensi kualitas.

Party dapat juga dilihat sebagai substansi produk politik. Partai mempunyai identitas utama, aset reputasi, dan identitas estetik. Ketiga hal tersebut akan dipertimbangkan oleh para pemilih. Oleh karena itu unsur-unsur ini harus dikelola dengan baik.

Persentation adalah bagaimana ketiga substansi produk politik (*Policy, Person, Party*) disajikan. Presentasi sangat penting karena dapat mempengaruhi makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih.

Secara garis besar bahwa makna politis yang akhirnya tertanam dalam benak pemilih merupakan hasil dari interaksi dua faktor. Pertama adalah kualitas dan kuantitas dari stimulus politik itu sendiri. Kedua adalah rujukan kognitif berupa kesadaran atau alam pikir seseorang yang memaknainya.

Apapun ragam dan tujuannya upaya yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioral*), yaitu :

Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap isu tertentu.

Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

Tindakan strategi politik yang persuasif menjadi titik tolak kampanye, ada beberapa macam teori kampanye, namun secara ringkas Klingeman dan Romellan membedakan kampanye ke dalam kampanye informatif dan kampanye komunikatif. Kampanye informatif dilakukan secara satu arah dimana pesan-pesan kampanye mengalir secara linear dari sumber kepada para penerima kampanye, tidak terjadi dialog antara pelaku dan penerima kampanye. Pelaku kampanye sepenuhnya mengandalkan media massa, iklan, baliho, dan lainnya sebagai media perantara untuk menyalurkan pesan-pesannya. Sedangkan kampanye komunikatif lebih berorientasi kepada

khalayak dan menekankan pada pentingnya interaksi dan dialog khalayak sasaran.

Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain:

a) Komunikator Politik

Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

b) Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur dan berita surat kabar mengenai politik, dll.

c) Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dsb.

d) Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan sebagainya.

e) Pengaruh atau efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam Pemilihan Umum.

Pendekatan komunikasi politik:

1. Pendekatan proses. Menurut pendekatan ini bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil suatu proses. Spengler dan Toynbee mengemukakan bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh banggunya peradaban. Pendekatan ini dapat dikatakan untuk memahami sosialisasi politik dan kebijakan publik.

2. Pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell C. McCombs, seorang profesor peneliti surat kabar juga sebagai direktur pusat penelitian komunikasi Universitas Syracuse USA, dan Donald L. Shaw, seorang profesor jurnalistik dari universitas North Carolina. Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pimpinan redaksi, dan penyunting

gambar. Dari gatekeeper inilah yang menentukan berita apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan.

2.2. Ideologi Sebagai Pondasi

Menurut Gramsci (dalam Roger Simon 2001:86), ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya tetapi harus dinilai dari "kemajuannya" dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam suatu wadah dan dalam peranannya sebagai "pondasi" atau agen proses penyatuan sosial. Suatu kelas hegemonik atau kalangan yang dominan adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok dan gerakan-gerakan lain ke dalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional. Dalam membangun blok tersebut, diperlukan juga adanya dimensi ideologis penting lainnya. Kehendak umum hanya dapat dibangun melalui reformasi intelektual dan moral yang akan menciptakan konsepsi umum akan dunia.

Dua poin penting menurut Gramsci (2001:91) muncul dari prinsip bahwa sebuah blok atau kelas yang ingin bergerak maju menjadi hegemoni perlu membangun sistem ideologis yang dapat bertindak sebagai pondasi yang bisa mengikat dan menyatukan berbagai kelompok sosial.

Pertama, suatu kelas tidak akan memperoleh hegemoni hanya semata-mata dengan menerapkan pandangannya sendiri terhadap semua kelas atau kelompok sosial lainnya.

Kedua, sistem ideologi baru tidak bisa dibuat sekali jadi sebagai jenis konstruksi intelektual yang dikerjakan oleh para pemimpin partai politik. Namun, ia harus dihadapkan dan secara bertahap dibangun melalui perjuangan politik dan ekonomi, dan karakternya akan bergantung pada hubungan berbagai kekuatan yang ada selama dibangun. Dalam membahas sifat perjuangan ideologi, sebuah kelas yang bergerak maju menuju hegemoni tidak harus menyapu bersih semua sistem ideologi yang berbeda dengannya, sebaliknya yang lebih penting adalah bagaimana melakukan transformasi terhadap ideologi-ideologi yang ada dengan tetap mempertahankan dan menyusun kembali beberapa unsur yang paling tangguh menjadi sistem baru.

2.2.1. Jenis-Jenis Ideologi

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan atau mengidentifikasi ideologi suatu partai. Seperti yang diutarakan oleh Ware dalam Firmanzah (2008:95) yang menyimpulkan terdapatnya kecenderungan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan ideologi politik berdasarkan dua pendekatan, pertama yaitu ideologi politik mana yang saling berkompetisi serta pendekatan kedua dapat dilakukan dengan mengelompokkan ideologi-ideologi politik yang memiliki kesamaan dan berada dalam satu rumpun keluarga. Tentunya, ideologi-ideologi dapat dikelompokkan dalam satu *cluster* ketika diantara mereka saling berbagi karakteristik yang hampir sama seperti tujuan politik, strategi realisasi, agenda politik dan gambaran masyarakat ideal yang ingin dibentuk. seperti tujuan politik, strategi realisasi, agenda politik dan gambaran masyarakat ideal yang ingin dibentuk.

Menegaskan apa yang disampaikan oleh Ware, Firmanzah (2008:96) mengelompokkan jenis-jenis ideologi politik dilakukan berdasarkan rumpun ideologinya. Misalnya terdapat ideologi yang terkait dengan semangat anarkis, konservatif, lingkungan, feminisme, liberalisme, nasionalisme, sosialisme dan agama. Sementara itu, ideology politik juga dapat menjadi hasil perpaduan diantara rumpun-rumpun ideologi besar. Misalnya ideologi liberal-feminisme yang mencoba menggabungkan ide dan gagasan antara gerakan feminisme dan liberalisme, ideologi environmental-konservatif yang merupakan sintesis dari semangat konservasi dan lingkungan hidup.

Apabila kita menengok kebelakang terhadap perkembangan perpolitikan Indonesia di era perjuangan maka terdapat 4 kelompok besar ideologi yang ada yaitu agama, nasionalis, komunis dan sosialis, Rusli Karim (1991:50). Dimana ideologi Agama yang diwujudkan dalam sosok H.O.S. Tjokroaminoto dan Agus Salim, Nasionalis yang diwakili oleh kaum cendekiawan hasil pendidikan barat modern merupakan golongan yang juga tak kalah fantastis nya dibandingkan golongan agama kala itu. Sukarno-Hatta dianggap sebagai perlambang dari golongan ini. Golongan lainnya adalah dari kubu komunias dan sosialis. Golongan komunis selalu ditandai oleh agresifitas dan pemberontak terhadap keadaan non-ismenya. Muso, Alimin, Tan Malaka adalah contoh konkrit yang berjuang dengan sikap konfrontatif melalui wadah pergerakan yang menggunakan ideologi komunis dan sosialis. Selain ketiga golongan seperti yang telah di sebut atas maka golongan yang terakhir yang sempat memberi warna terhadap perkembangan ideologi perpolitikan di era perjuangan bangsa ini yaitu ideologi sosialis. Sjahrir

adalah lambang ketangguhan kelompok ini. Konsep "mendunia" di balik kedok "sosialisme" yang diujakan Sjahrir telah membuatnya timbul tengelam dalam sejarah gerakan politik di Indonesia.

2.2.2. Ideologi Nasionalis

Kemerdekaan negara-negara nasional yang bermunculan sesudah Perang Dunia II diperoleh melalui perjuangan melawan penguasa kolonial sejak sebelum perang dunia II. Masyarakat kolonial merupakan masyarakat berdasarkan diskriminasi ras, subordinasi pribumi, negasi identitas dan eksploitasi. Di kalangan kaum inteligensia, perlakuan menurut sistem tersebut menimbulkan kesadaran kolektif akan nasib seperti itu sehingga timbul semangat untuk memperbaikinya dan mengusahakan kemajuan lewat pendidikan. Disamping itu, besar pula idealisme untuk memperbaiki tingkat hidup dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dirasakan, betapa berat keterbelakangan yang membelenggu rakyat.

Organisasi yang dibentuk dipakai tidak hanya sebagai wadah aktivitas membangun, tetapi juga sebagai simbol baru dari identitas. Organisasi itu pun berfungsi sebagai forum komunikasi baru dan arena politik tempat mereka berkumpul, berapat dan berdiskusi. Dalam pergerakannya, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggunakan nasionalisme dalam memperoleh kemerdekaan. Sumpah pemuda (1928) serta munculnya pergerakan-pergerakan di Tahun 1925 yang anti kolonialisme menunjukkan betapa besarnya keinginan bangsa ini untuk bebas. Sartono Kartodirdjo (1999:10) mengungkapkan terdapat

tiga prinsip nasionalisme bangsa ini saat itu yaitu : pemerintahan Indonesia perlu dipegang oleh mereka yang dipilih oleh Bangsa Indonesia, dalam memperoleh tujuan itu Bangsa Indonesia tidak memerlukan bantuan dari manapun dan agar perjuangan itu berhasil maka seluruh rakyat Indonesia harus bersatu. Apabila kita perhatikan tiga prinsip nasionalisme tersebut maka diwujudkan oleh pendiri-pendiri bangsa ini kedalam rumusan dasar negara yaitu Pancasila.

Namun demikian terdapat beberapa prinsip-prinsip nasionalisme yang dikemukakan oleh Kartodirdjo (1999:10) yaitu : Kesatuan (*unity*) yang mentransformasikan hal-hal yang polimorfik menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi Kebebasan (*liberty*), khususnya bagi negeri-negeri jajahan yang memperjuangkan pembebasan dari kolonialisme Kesamaan (*equality*) sebagai implisit dari masyarakat demokratis yang merupakan *antithese* dari masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter Kepribadian (*identity*) yang lenyap karena negasi colonial Prestasi amat diperlukan untuk mendai sumber inspirasi dan kebanggaan bagi negara nasional.

Dalam komunikasi politik, konsep tentang nasionalisme perlu diterjemahkan dengan metafor dan simbol sehingga *imago* konkret lebih mudah dapat dipopularisasikan. Tidak dapat diabaikan adanya suatu kenyataan bahwa pada prinsip-prinsip nasionalisme melekat paham demokrasi, kualitas hidup dan keadilan sosial. Dengan demikian maka terdapat hubungan antara nasionalisme dan Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa paham nasionalisme di negara ini pertama kali dimunculkan di era perjuangan bangsa ini yang dibawa oleh kaum muda dan terpelajar serta membawa ide-ide barat dalam pergerakan di Negara ini.

Sebut saja Soekarno-Hatta yang merupakan perlambang dari gerakan nasionalisme ini. Ideologi ini mampu mewarnai perpolitikan bangsa ini hingga saat ini. Sehingga nasionalisme di Indonesia identik dengan Soekarno karena pemikiran-pemikiran beliau mengenai nasionalis mewarnai dokumen-dokumen resmi negara ini.

Paradigma Komunikasi Politik

Paradigma adalah sudut pandang terhadap sesuatu, dalam ilmu komunikasi paradigma ilmunya berkembang sangat pesat. Selain komunikasi sebagai ilmu sosial yang terus berkembang, paradigma yang mempengaruhinya ikut berkembang secara revolusioner.

Paradigma lama dan baru saling mempengaruhi membentuk ilmu komunikasi semakin dalam dan luas. Perkembangan paradigma komunikasi tersebut secara tidak langsung berpengaruh juga pada perkembangan sudut pandang pada komunikasi politik, sebagai bagian dari ilmu komunikasi yang terus berkembang.

Ada 4 paradigma yang dikenal mempengaruhi tumbuh kembang ilmu komunikasi termasuk di dalamnya komunikasi politik.

1. Paradigma Mekanistik

Paradigma ini menjelaskan bahwa Komunikasi sebagai suatu proses, dipahami sebagai suatu proses dipahami sebagai suatu mekanisme yang berjalan dari...., ke...., melintasi ruang dan waktu dari satu titik ke titik lainnya. Komponen-komponen dalam model mekanistik sangat jelas, yaitu sumber/penerima, saluran, pesan/umpan balik, dan efek. Sesuai dengan doktrin mekanisme (idealisme mekanistik), yang berdasarkan cara berpikir sebab-akibat, titik berat kajiannya adalah pada efek.

Dalam komunikasi politik (KP) Dan Nimmo menjabarkan formula Lasswel, bahwa dalam KP terdapat unsur-unsur yang dapat dikenal, yaitu komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak politik, dan efek politik.

Efek Politik telah menjadi pusat kajian politik dalam paradigma mekanistik study tentang efek semakin berkembang sejalan dengan kekhawatiran banyak orang akibat atau dampak media massa (termasuk globalisasi informasi) terutama media elektronik (ingat misalnya gagasan McLuhan tentang Desa Jagat dan Novel Barve New World 1984).

Doktrin mekanisme juga mengajarkan bahwa selain efek itu bisa diramalkan, juga bisa diciptakan (direayasa), dengan menghilangkan kendala atau rintangan yang mungkin terjadi melalui suatu perencanaan pada awal.

Walaupun paradigma ini mulai memudar seiring dengan perkembangan zaman, namun dalam komunikasi politik dan studi mengenai pendapat umum, propaganda, perang urat saraf, kampanye, pengaruh media massa pada terhadap

sosialisasi politik dan peranan komunikasi terhadap partisipasi politik, masih sangat dominan.

2. Paradigma Psikologis

Paradigma Psikologis ini menjelaskan bahwa komunikasi dikonseptualisasikan sebagai penerimaan dan pengolahan informasi pada diri individu. Perspektif yang dipengaruhi secara sporadis oleh psikologi itu adalah mengadaptasikan konsep S – R dalam komunikasi. Sehingga eksistensi empiriknya (fokusnya) tidak terletak dalam saluran sebagaimana paradigma mekanisits melainkan fokus pada diri individu.

Filter konseptualisasi itu dapat digambarkan sebagai sikap, keyakinan, motif, tanggapan dan persepsi yang dapat menjadi perangkap atau penyerap dari semua rangsangan yang menyentuh individu. Dengan demikian komunikasi dalam model psikologi merupakan masukan dan luaran stimuli yang dikembangkan dan diseleksi dari stimuli yang terdapat di dalam lingkungan informasi. Karena itu situasi komunikasi ditandai oleh medan stimuli yang terstruktur dan derajat kesengajaan di pihak komunikasi.

Unsur komunikasi dalam paradigma ini bukan lagi komponen-komponen yang dikemukakan Lasswell melainkan stimulus dan respon dengan fokus kajian pada individu.

Dalam batas tertentu orientasi para penerima dari model ini merupakan reaksi atas model mekanisits. Dengan fokus pada individu paradigma psikologi telah

memberikan penekanan pada komunikasi intrapersona dibanding perspektif lainnya.

2.2.3. Idiologi Agama

Islam sebagai salah satu dasar ideologi politik mempunyai sumbangan atau andil yang sangat besar, sebagai suatu kekuatan yang terbilang lahir pertama kali di Indonesia. Islam dengan ideologi bukanlah suatu keanehan atau mengada-ada. Tradisi berpoltik dalam Islam telah dicontohkan oleh Nabi pembawa Islam itu sendiri, Muhammad, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan, panglima perang disamping pembawa misi ke rasulan dan kenabian nya, sebagai utusan Tuhan. Sepeti yang dikatakan Natsir (Rusli Karim, 1983:53) Islam adalah falsafah hidup, satu levens filosofie atau asatu ideologi, satu sistem perikehidupan disamping ideologi dan isme-isme lain. Ideologi ini menjadi pedoman bagi umat Islam dan tak dapat dilepaskan dari politik. Denga kata lain dalam berpoltik tak dapat melepaskan dari ideologi Islam. Sesuai dengan tuntutan Islam maka hidup bermasyarakat, bernegara, menegakkan kemerdekaan tak dapat dilepaskan dari menegakkan Islam. Oleh karena demikian lengketnya Islam sebagai pandangan hidup dengan kehidupan itu sendiri maka segala segi kehidupan pun harus dituntun oleh Islam, termasuk berpoltik.

Umat Islam Indonesia telah banyak kontribusi dan partisipasinya kepada perjuangan kemerdekaan dan ikut aktif mempersatukan aliran Nasionalisme dan Islamisme. Pada jaman pergerakan kemerdekaan nasional di tahun 1920-an dan 1930-an kedua kekuatan tersebut menjalankan politik non-kooperasi terhadap

kolonialisme Belanda. Islam melalui pergerakannya adalah yang pertama meretas jalan di negeri ini untuk kegiatan politik yang mencita-citakan kemerdekaan dan menebarkan benih kesatuan Indonesia. Dengan kata lain Islam di Indonesia adalah tenaga pembangkit dan pengembangan nasionalisme Indonesia. Tak heran jika pengamat asing seperti Khan (dalam Rusli Karim, 1983:54) mengatakan bahwa Islam bukan hanya merupakan ikatan bersama, melainkan juga sesungguhnya merupakan semacam lambang dalam golongan yang menentang kaum penjajah asing dari berbagai macam agama. Dengan demikian maka ideologi Islam merupakan ideologi yang diterapkan oleh pengikutnya atau penganutnya yang didasarkan kepada Allah SWT.

2.2.4. Penyebaran Ideologi Partai Politik

Penyebarluasan terhadap nilai-nilai baru, pada umumnya berada dalam situasi kompetisi dan bergesekan dengan nilai yang telah ada atau telah melembaga pada masyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik dan penolakan terhadap yang baru tersebut. Atau sebaliknya nilai yang baru akan dianggap sebagai udara yang segar yang dinantikan dikalangan masyarakat telah berada dalam titik jenuh dan nilai lama sudah tidak cocok dengan tingkat perkembangan yang ada pada masyarakat. Pergeseran nilai-nilai lama ke arah yang baru, pada tingkat permulaan selalu ditandai oleh kegiatan-kegiatan propaganda. Dalam hal ini propaganda menempatkan diri sebagai pemandu dan pengarah jalan dalam memberikan gambaran situasi yang baru dianggap benar dan akan menguntungkan bagi masyarakat yang bersangkutan. Pada awal kondisi baru, secara psikologis masyarakat mudah untuk dirangsang, karena dalam situasi baru

belum terdapat suatu attitude dan pemikiran yang mendalam, sehingga rangsangan sentimen akan lebih efektif dibanding dengan rangsangan rasional. Asal saja rangsangan tersebut diarahkan pada nilai-nilai interest dan nilai dignity masyarakat.

Demikian pula dalam penyebarluasan suatu ideologi politik, konsep propaganda ditempatkan prioritas utama sebelum kegiatan yang bersifat indoktrinatif dilaksanakan. Karena pada tingkat permulaan yang dibutuhkan dalam penerapan ideologi politik adalah dukungan massa yang sebesar-besarnya dan untuk sementara mengesampingkan penilaian atas segi kualitas pengikut. Hal ini sesuai dengan sifat dan karakteristik propaganda sendiri, yang hanya memerlukan nilai kuantitas.

Akan tetapi sistem politik suatu negara dapat pula membedakan dan mewarnai terhadap propaganda sendiri, sebagai mana dapat dibedakan antara propaganda di negara totaliter dan negara yang menganut sistem demokrasi politik.

2.3. Jenis – Jenis Strategi Komunikasi Politik

Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Oleh karena itu, sebelum strategi itu dijalankan perlu diadakan perumusan strategi terlebih dahulu agar apa yang hendak dicapai dari pelaksanaan strategi yang dimaksud dapat berjalan dengan baik. Dalam merumuskan strategi (Sun Tzu,1983:89)menjelaskan bahwa dalam pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan Seperti :

1. Menyerang strategi lawan, untuk dapat menyerang lawan maka strategi lawan tersebut harus dikenali terlebih dahulu. Penyerangan strategi lawan berarti secara terus menerus mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan sehingga lawan tidak dapat merealisasikan strateginya.
2. Menghancurkan aliansi lawan, apabila lawan memiliki hubungan yang baik dan berpengaruh dengan kelompok masyarakat (serikat, perhimpunan perusahaan, partai-partai, dsb) maka ikatan-ikatan itu harus di renggangkan. Hal ini dapat dilakukan, baik melalui penawaran yang menarik maupun merusak kredibilitas lawan atau merusak kepercayaan aliansi terhadap lawan.
3. Melakukan pertarungan dibidang politik (tema, pribadi, dsb) tema-tema yang dipilih sebaiknya merupakan tema yang membawa keberuntukan atau tema yang dilupakan lawan. Kemungkinan yang termasuk adalah menduduki daerah kekuatan lawan atau dalam istilah pemilu yaitu basis massa. Dengan demikian bidang tema yang diungkit tidak boleh merupakan kekuatan lawan.

Apa yang dikemukakan oleh Sun Tzu tersebut, peneliti mencoba mengaitkan dengan teori politik yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa

“ Manusia itu selalu berlomba untuk mengatasi manusia lain, karena adanya rasa takut bahwa tidak akan mendapatkan pujian. Dalam persaingan diantara sesama manusia setiap orang dapat mempergunakan cara apapun sehingga lawan dapat dikenal dan dapat terhindar dari kematian. Untuk tidak mengalami kematian dalam persaingan atau perlawanan itu maka setiap orang berupaya

seminimal mungkin untuk mampu mempertahankan diri sebagai benteng terakhir dalam persaingan”.

Dari pendapat (Sun Tzu, 1983:90) dan teori yang dikemukakan Hobbes diatas, menggambarkan bahwa seorang calon yang hendak maju dalam sebuah pemilihan harus mengetahui atau memiliki informasi mengenai dinamika politik yang sedang berkembang dalam sebuah wilayah serta mengenal sejauh mana kekuatan lawan-lawan politiknya, sehingga semua langkah-langkah yang di perlukan, termasuk perencanaan strategi yang sifatnya prioritas dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat berguna dalam upaya-upaya pemenangan pada setiap kompetisi, tidak terkecuali dalam pemilukada Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu dari pemaparan diatas terlihat bahwa dalam mencapai kekuasaan seseorang dalam menggunakan berbagai cara untuk memperoleh tujuannya.

Schroder mengemukakan bahwa pola dasar strategi yang di perlukan harus kita kenali agar dapat menetapkan pilihan strategi yang tepat. Dalam setiap pola dasar, dimana pilihan tersebut di dasarkan pada citra yang diinginkan dan tujuan yang hendak di capai. Pada dasarnya strategi dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Strategi ofensif (strategi memperluas pasar dan menembus pasar) dan strategi defensif (mempertahankan pasar dan strategi menutup/menyerahkan pasar).

2.3.1. Strategi Ofensif

Bagi Schroder strategi ofensif selalu dibutuhkan, misalnya apabila partai atau pasangan calon yang maju pada bursa pemilihan ingin memperoleh atau meningkatkan jumlah pemilihnya. Dalam hal ini, harus ada lebih banyak orang

yang memiliki pandangan positif terhadap partai atau pasangan calon tersebut, sehingga strategi berhasil.

Strategi ofensif adalah strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar. Kedua strategi ofensif ini jika akan diterapkan dalam kampanye pemilu/pemilukada harus menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara kita dengan pasangan calon beserta partai-partai pengusung calon lain yang ingin kita ambil alih pemilihnya.

2.3.2. Strategi Perluasan Pasar

Dalam strategi pemilu, strategi perluasan pasar yang ofensif bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada dalam hal ini basis massa. Oleh karena itu harus ada penawaran yang lebih baik para pemilih yang selama ini memiliki kecenderungan untuk memilih partai atau pasangan calon lain yang menjadi pesaing dalam pemilihan umum. Strategi semacam ini perlu di persiapkan melalui sebuah kampanye pengantar, untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang penawaran yang lebih baik di bandingkan dengan penawaran yang berasal dari partai atau pasangan calon yang lainnya.

2.3.3. Strategi Menembus Pasar

Menurut Schroder, strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih yang diindikasikan akan memilih pasangan calon lain atau masyarakat yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalan potensi yang sudah ada secara lebih optimal.

2.3.4. Strategi Defensif

Bagi Schroder, strategi defensif akan muncul kepermukaan, misalnya apa bila partai pemerintah atau sebuah koalisi yang terdiri dari beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya. Selain itu, strategi defensif juga akan muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup dan penutupan pasar ini diharapkan akan membawa keuntungan sebanyak mungkin.

2.3.5. Strategi Mempertahankan Pasar

Strategi ini merupakan strategi yang khas untuk mempertahankan pasar atau basis massa. Dalam kasus semacam ini jika dikaitkan dalam sebuah pemilihan, partai atau pasangan calon akan memelihara pemilih yang sudah diperkirakan akan menjadi pemilih tetap mereka atau yang biasa disebut basis massa dan memperkuat para pemilih musiman sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung. Pasangan calon beserta tim pemenangannya yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap atau strategi yang bertentangan dari para pesaingnya yang menerapkan strategi ofensif. Apabila yang satu ingin menonjolkan perbedaan yang ada guna memberikan penawaran yang menarik, maka kelompok yang menerapkan strategi defensif justru ingin agar perbedaan yang ada tidak dikenali.

2.3.6. Strategi Menyerahkan Pasar

Menurut Schroder strategi menyerahkan pasar memiliki dua arti, seperti : (1) Sebuah partai ingin menyerah dan dalam situasi tertentu ingin

melebur dengan partai lain. (2) Dalam pemilihan umum yang menggunakan *ballotage* (*ballotage*), ada tahap pemungutan suara yang kedua yang hanya diikuti oleh kandidat-kandidat terkuat dari pemilu tahap pertama, maka para kandidat lainnya dihadapkan pada langkah atau strategi apa yang akan dijalankan. Apa bila para kandidat lainnya tersebut akan menyerahkan pasarnya, mereka harus mempertegas alasan yang mendasar dan mencakup persetujuan politik hingga pembagian kekuasaan.

2.4. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pemilukada) kemudian diatur dalam peraturan pemerintah. Pemilukada dianggap sebagai salah satu ciri demokrasi modern di tingkat lokal atau pesta demokrasi dan merupakan bagian dari pemilihan umum di tingkat lokal pemilihan berarti prosedur yang diakui oleh aturan-aturan Organisasi, memilih sejumlah orang atau satu orang untuk memegang suatu jabatan dalam suatu organisasi.

Sedangkan pemilihan umum adalah rakyat memilih pemimpin mereka berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya dan rakyat akan memberikan amanatnya kepada pemimpin yang terpilih. Fungsi pemilu di negara demokrasi adalah sebagai sarana legitimasi politik, fungsi perwakilan politik, pemilu sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa dan pemilu sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat.

Membahas masalah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung, maka ada beberapa aspek yang terkait di dalamnya, yaitu

definisi, tujuan mekanisme tahapan dan penetapan pemilih dalam pemilihan kepala daerah langsung. Beberapa aspek tersebut adalah sebagai berikut :

2.5. Definisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilukada adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah dilaksanakan secara langsung, artinya rakyat yang ada di daerah yang bersangkutan bebas untuk menggunakan hak suaranya dalam memilih pemimpin mereka. Hal tersebut dimuat dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
2. Kepala daerah sebagaimana dimaksud untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota.
3. Kepala daerah sebagaimana dimaksud dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.
4. wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud untuk provinsi disebut wakil Gubernur, Kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.
5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang

bersangkutan.

Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Yang berhak mengusulkan calon adalah parpol atau gabungan parpol yang memiliki perolehan kursi di DPRD minimal 15% dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Lebih lanjut mengenai sistem pemilihan kepala daerah masih diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 107 yang berbunyi:

1. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
2. Apabila ketentuan sebagaimana tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
3. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
4. Apabila ketentuan tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan

putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

5. Apabila pemenang pertama diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
6. Apabila pemenang pertama diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan, berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
7. Apabila pemenang kedua sebagaimana diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
8. Pasangan calon kepala dan calon wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah merupakan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016, dan selanjutnya KPUD bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.

Proses Pemilukada juga melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana keanggotaannya berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Panitia Pengawas Pemilihan umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib

menyampaikan laporannya seperti halnya dengan KPUD.

Melihat uraian diatas maka telah tergambar apa pemilukada itu, bagaimana prosesnya dan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Secara umum pemilukada dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau prosedur untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati. Dan yang jelasnya bahwa proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di negara kita merupakan agenda politik yang baru pertama kali dilakukan. Pada masa sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dan rakyat hanya menjadi penonton. sehingga boleh dikatakan bahwa pada masa sebelumnya masyarakat daerah. jauh dari pemimpinnya. Atau dengan kata lain kepala daerah sulit untuk merangkul masyarakatnya.

2.6. Tujuan Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung

Salah satu tujuan terpenting dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung, adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Kualitas pemimpin itu dapat diukur dari dua instrumen yaitu tingkat pendidikan dan kompetensi. Namun sebagai pejabat politik, kepala daerah yang terpilih haruslah orang yang dapat diterima secara umum sehingga dukungan yang luas dapat diperoleh, tidak hanya dukungan horisontal, tetapi juga vertikal dari elit politik yang ada di tingkat nasional dan pemerintah pusat. Jika demokrasi dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan prinsip dasarnya, misalnya tidak ada intervensi dan permainan *money politic* (politik uang), maka pemimpin daerah yang dihasilkan akan sangat berkualitas.

Sebaliknya jika proses demokrasi dikotori oleh kecurangan dan penyimpangan akibat politik uang misalnya, maka kualitas pemimpin daerah yang dihasilkan diyakini sangat rendah atau jauh dari harapan dan cita-cita rakyat.

Pemilukada langsung adalah momentum paling strategi untuk memilih kepala daerah yang berkualitas. Keberhasilan pemilukada langsung tidak hanya diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat dan hasil yang diperoleh, apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila pemilukada langsung hanya dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan mekanisme *voting* dari suara pemilih, maka dikhawatirkan akan menghasilkan pemimpin yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelolah daerah.

Disisi lain pemilihan umum kepala daerah secara langsung akan sangat berarti bagi pemimpin yang terpilih, karena pemimpin tersebut mendapatkan legitimasi yang luas dari masyarakat yang menilainya. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pemimpin yang terpilih akan mendapatkan pula dukungan langsung luas dari masyarakat. Hal ini sangat berbeda pada pemilukada sebelumnya dimana kepala daerah hanya dipilih oleh segelintir orang saja, yaitu mereka yang menjadi wakil rakyat di DPRD yang belum bisa mewakili suara rakyat, disamping itu pemilukada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran

berpartisipasi politik masyarakat di daerah serta untuk mendapatkan pemerintah di daerah dengan rakyatnya.

2.7. Penetapan Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilukada

Pemilih yang dimaksud adalah warga negara yang telah memiliki hak pilih dalam pemilukada langsung, yaitu warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan genap berusia tujuh belas (17) tahun atau sudah pernah menikah. Penetapan pemilih dalam pemilukada langsung diatur dalam Undang-Undang pemilukada. Secara rinci mengenai syarat-syarat pemilih dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih sebagaimana harus memenuhi syarat :
 - Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum
 - disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
3. Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam proses pendaftaran pemilih untuk pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah, daftar pemilih pada saat pemilu terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Daftar pemilih dimaksud ditambah dengan daftar pemilih tambahan yaitu warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara.

Seorang warga negara yang memiliki hak memilih hanya didaftar satu kali saja dalam daftar pemilih. Pemilih yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal harus menentukan salah satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. sebagai tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran. kemudian ditukarkan dengan kartu pemilih.

2.8. Partai Politik

Komunikasi politik berkaitan juga dengan partai politik, karena partai politik di Negara demokrasi menyelenggarakan fungsi sebagai sarana komunikasi politik. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Sedang dalam aplikasi dan proses sosialisasi politik dan rekrutmen politik tergantung pada komunikasi politik. Justru itu komunikasi politik menyentuh semua aspek system politik. Komunikasi politik berperan dalam aktivitas partai politik yang pada umumnya adalah : pemikiran politik, pembicaraan politik, dan tindakan politik. Sedang partai politik menjadi jembatan arus informasi timbal balik dari “ mereka yang memerintah ” (the rules) dengan “ mereka yang diperintah ” (the ruled). Dalam menjalankan fungsi itulah maka

partai politik dapat menjadi bursa ide-ide (*clearing house of ideas*) yang hidup dan dinamis (Miriam, 2010 : 406).

Aspirasi rakyat berupa tuntutan dan kepentingan yang beragam yang disampaikan dalam berbagai cara, ditampung oleh partai politik, kemudian diolah dan dirumuskan sehingga bisa diteruskan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan public lainnya, dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (*public policy*). Proses merumuskan kepentingan – kepentingan rakyat itu dinamakan “ perumusan kepentingan ” atau “ artikulasi kepentingan ” (*interest articulation*). Sedang proses menggabungkan menjadi satu berbagai macam tuntutan dari berbagai kelompok tentang hal yang relative sama, dinamakan “ agregasi kepentingan ” (*interest aggregation*) atau “ penggabungan kepentingan ” (*ibid*). “Artikulasi kepentingan ” dan “ agreasi kepentingan ”, kemudian oleh partai politik dimasukkan dalam program partai untuk di perjuangkan menjadi kebijakan umum atau menjadi undang-undang, kebijakan umum (*public policy*), dan peraturan lainnya. Dalam seluruh proses itu arus komunikasi politik berjalan secara timbal balik antara rakyat dengan pengambil keputusan politik melalui partai politik. Berdasarkan definisi di atas walaupun sepintas tampak berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun secara umum partai politik dapat diartikan sebagai kelompok orang dalam satu usaha bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan biasanya melalui suatu mekanisme politik yang disebut pemilu.

2.9. Merumuskan Misi

Perumusan misi menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategis. Hal ini harus mencakup sekurang-kurangnya tiga elemen:

1. Tujuan secara keseluruhan – yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut.
2. Alasan pentingnya mencapai tujuan secara keseluruhan.
3. Kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

Seperti yang telah dijelaskan alasan yang mendasari pencapaian tujuan secara keseluruhan sangatlah penting. Bagi von Clausewitz, kemenangan dalam perang mungkin menjadi tujuan awal, tetapi tujuan perang yang sesungguhnya – yang juga menjadi alasan berperang – adalah perdamaian. Hal ini dicapai melalui perang defensif di wilayah kekuasaan sendiri dan perang agresi di wilayah asing.

2.10. Penilaian Situasional Dan Evaluasi

Analisa situasi dan evaluasi membahas evaluasi fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan, serta perkiraan kemungkinan keberhasilan tujuan yang terealisasi. Fakta-fakta yang dimaksud di sini termasuk fakta-fakta organisasi sendiri, fakta-fakta mengenai pekerja – jika ada – dan fakta-fakta lingkungan di mana akan dicapai.

2.10.1. Perumusan Sub-Strategi

Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibuk kan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju ke depan untuk perumusan sub-strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas apakah sebuah strategi akan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah

dirumuskan atau masih perlu direvisi. Dari situ muncul tugas-tugas yang perlu didukung dengan keputusan strategis.

2.10.2. Perumusan Sasaran

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab selanjutnya adalah memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan di implementasikan melalui pembagian tugas. Begitu pun bila strategi-strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan persoalan (kelemahan) sendiri juga ditetapkan. Dengan demikian, tujuan taktis yang rinci dan jelas harus didefinisikan.

Sasaran harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Semua sasaran ini juga harus terfokus pada tujuan utama yang telah disebutkan dalam perencanaan.

Apabila sasaran sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Sasaran ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah sasaran-sasaran ini dirumuskan.

2.10.3. Target Image (Citra Yang Di inginkan)

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau Public Relations (PR) dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat "PR", setelah keputusan mengenai citra yang diinginkan (target image) ditetapkan. Letak kelemahan pemerintah dan departemen-departemen banyak sekali ditemukan dalam pekerjaan bidang

kehumasan ini. Dengan pandangan yang salah bahwa mereka memiliki kekuasaan yang cukup, mereka mengimplementasikan berbagai tindakan seperti kenaikan pajak, kenaikan harga bahan pangan, privatisasi, dsb. – tanpa melakukan persiapan yang cukup melalui pekerjaan kehumasan. Hal ini seringkali menimbulkan reaksi penolakan yang kuat dari masyarakat, yang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak oposisi dan kelompok lainnya yang berkepentingan – sehingga rencana reformasi tersebut perlu ditarik kembali.

Target image melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok-kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang dibuat yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan. Target Image menetapkan landasan untuk pekerjaan kehumasan. Semua kegiatan kehumasan ditujukan untuk penyebarluasan target image ini – dan menanamkannya dalam benak orang-orang yang menjadi sasaran.

2.10.4. Kelompok-Kelompok Target

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi-organisasinya yang penting untuk pencapaian misi. Mereka perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok-kelompok target ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan (*target image*). Apabila kelompok-kelompok target telah didefinisikan, fondasi untuk implementasi strategi yang komunikatif

ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci.

2.10.5. Pesan Kelompok Target

Kelompok target yang telah dibahas di atas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya, untuk memungkinkan mereka bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Untuk itu, harus diketahui dengan jelas, aspek-aspek target image mana sajakah yang akan mendapat respon positif dari kelompok target. Hal ini menjelaskan semua argumen yang dapat memotivisir kelompok target. Terkadang dimungkinkan untuk memasukkan informasi-informasi tambahan ke dalam pesan kelompok target untuk masing-masing kelompok target – lebih dari target image secara keseluruhan. Informasi-informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada.

Sebagai contoh adalah strategi yang digunakan dalam sebuah kampanye pemilu. Dalam kampanye pemilu semacam itu, kelompok target atau kelompok-kelompok pemilih tertentu – donatur potensial dan para anggota partai sendiri, turut memainkan peran masing-masing sebagai kelompok target. Ketiga kelompok target tersebut masing-masing membutuhkan informasi yang berbeda, untuk dapat bereaksi sesuai dengan strategi.

Para pemilih diharapkan memilih partai atau kandidat. Ini berarti bahwa pemilih perlu dimotivasi melalui visi politik atau melalui janji-janji yang

menguntungkan mereka. Donatur diharapkan memberikan sejumlah dana kepada partai. Untuk itu, partai harus menawarkan keuntungan lain bagi kelompok target ini – di samping keuntungan yang mereka tawarkan kepada pemilih lainnya. Anggota-anggota partai diharapkan dapat aktif dan dapat meyakinkan para pemilih dalam pengaruh mereka. Untuk itu mereka membutuhkan informasi dan keyakinan tertentu – yang jauh lebih besar dari yang dibutuhkan oleh para pemilih lainnya.

Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diterima masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Ini artinya, bahwa masing-masing kelompok target bisa saja memperoleh pesan atau informasi tertentu, namun pesan-pesan ini harus menunjukkan konsistensi atau kesesuaian satu sama lainnya. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada suatu kelompok pemilih tertentu. Janji semacam ini diberikan melalui saluran komunikasi yang tertutup, agar tidak diketahui oleh kelompok pemilih lainnya. Perlu diketahui bahwa pemanfaatan instrumen untuk tujuan semacam ini sebaiknya dihindari - mengingat saluran komunikasi biasanya tidaklah aman/tertutup – dan hal ini dapat menimbulkan efek komunikasi yang "tumpah-ruah" (*spill-over*).

Contoh bagaimana sebuah pesan kelompok dalam fase akhir suatu kampanye pemilu digunakan sebuah partai menjanjikan akan menaikkan gaji guru apabila partai tersebut memenangkan pemilu. Tentu saja janji ini menarik bagi kaum guru. Partai akan berusaha menyebarluaskan janji ini melalui saluran

informasi yang tertutup, untuk menghindari bahwa pegawai negeri lainnya juga menuntut kenaikan gaji. Namun apabila informasi ini bocor – karena saluran informasi yang digunakan tidak benar-benar tertutup, maka hal ini hanya akan menimbulkan keresahan pada kelompok-kelompok lainnya, dan akan memperkecil kemungkinan partai ini untuk menang.

2.10.6. Instrumen-Instrumen Kunci

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok-kelompok target. Sebagai contoh adalah pendekatan yang diterapkan terhadap remaja dan warga masyarakat yang lebih tua. Kedua kelompok target ini . Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang ingin dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya dapat diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen-instrumen kunci yang akan digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang terkait dengan sumberdaya untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok-kelompok target yang dipilih, menjadi prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan strategi.

2.10.7. Implementasi Strategi

Dalam pengimplementasian strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan, terlebih dahulu perlu diambil keputusan tentang tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrumen-instrumen

kunci. Setelah itu, barulah aturan-aturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan. Aturan ini merupakan bagian yang penting dalam implementasi strategi. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan berikut ini perlu dijawab:

- 1) Siapa yang bertanggung jawab atas pengimplementasian strategi.
- 2) Pengaruh apa yang dimiliki pimpinan politik terhadap strategi.
- 3) Siapa yang berwenang mengangkat dan memecat orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan strategi tersebut.
- 4) Kualitas atau kemampuan apa saja yang perlu dimiliki oleh pimpinan pelaksana strategi.

Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek: Pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Hubungan antara ketiga pihak ini, kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi dan etika merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal bagi keberhasilannya tergantung pada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya. Penundaan yang tidak perlu dapat membahayakan setiap perencanaan, karena penundaan hanya akan menimbulkan kelelahan dan kekecewaan dalam organisasi sendiri. Oleh karena itu, penundaan harus dihindari.

2.10.8. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua unsur, dan keduanya menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi :

1. Unsur pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Penting diperhatikan bahwa kita perlu memantau lawan dan mengatur arus informasi secara terus-menerus setiap saat, bahkan pada saat pertama kali melaksanakan strategi. Karena itu, kontak yang berkesinambungan dengan anggota, simpatisan beserta aliansi lawan – beserta laporan-laporan dan dokumentasi – juga tercakup di dalamnya. Termasuk juga di sini, pengumpulan data melalui survei, analisa media, dan juga, tentu saja, perolehan informasi dari kantor pusat pihak lawan. Dengan bantuan data intelijen dan informasi yang diperoleh, proses kontrol strategi dapat dijalankan secara teratur. Hal ini mencegah terjadinya suatu kejutan yang tak diinginkan, penilaian yang keliru serta pengambilan keputusan yang salah.
2. Unsur kedua adalah prinsip keamanan dan perlindungan informasi di pihak sendiri. Dalam praktiknya, hal ini berarti perlindungan terhadap tindakan penyusupan dari organisasi lawan. Karena itu, rencana-rencana strategis harus sangat dirahasiakan. Dalam organisasi yang demokratis, kecenderungannya adalah mendiskusikan dan mengembangkan perencanaan strategis secara terbuka dan partisipatif. Tapi, hal ini dapat membahayakan kerahasiaan perencanaan. Tindakan pengamanan yang tegas dan hukuman yang keras (mengancam) bagi mereka yang membocorkan rahasia strategi,

2.11. Penelitian Terdahulu

1. Nama : Christianto Pontoh

Judul penelitian

Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye pemenangan yang di susun oleh tim pemenangan pasangan kandidat bupati dan wakil bupati kabupaten Minahasa Jantje W Sajow dan Ivan Sarundajang terbukti berjalan dengan baik dan berhasil memenangkan kandidat yang mereka usung

2. Nama : Arief Zaafril Razaqtar

Judul Penelitian

Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono - Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran partai politik dalam menentukan kader terbaiknya untuk menduduki posisi pengambil kebijakan (policy maker) adalah hal yang wajib dilakukan guna memenangkan kontestasi.

3. Nama : Yusa Djuyandi

Judul Penelitian

Komunikasi politik tim pemenangan hendra hemeto dalam pemilihan ketua dpd II partai golkar kabupaten gorontalo periode 2016–2021.

Hasil Penelitian

Kemenangan Hendra Hemeto menarik untuk dikaji terutama berkaitan dengan bagaimana pola komunikasi politik diri dan tim kampanyenya dalam Musda

Partai Golkar hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan Hendra Hemeto tidak lepas dari pengelolaan komunikasi politik yang baik terutama oleh tim kampanye dirinya.

2.12. Pesan Politik

Ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda, perang urat saraf (psywar), makna logo , warna baju, atau bendera , bahasa badan (body language) dan semacamnya.

2.12.1. Sasaran Atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Meraka adalah pengusaha, pegawai negeri, (mestinya tidak memiliki jika tidak punya hak untuk dipilih), buruh , pemuda, perempuan, ibu rumah tangga , pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, cukur, becak) orang cacat, mahasiswa, sopir, angkutan, nelayan, petani, yang berhak memilih maupun pelajar dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia.

2.12.2. Strategi Menembus Pasar

Menurut *Peter Schroder*, strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalian potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalian bagian yang dimiliki dalam kelompok target dimana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Hal ini menyangkut pemasaran program yang dimiliki secara lebih baik dan peningkatan intensitas

- a. keselarasan antara program dan individu, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target. Bagi organisasi ini berarti:
- b. Peningkatan motivasi multiplikator dan pemegang jabatan, melalui iklan keuntungan yang ditawarkan secara lebih baik.
- c. Pemanfaatan jalur komunikasi yang baru
- d. Perbaikan argumentasi melalui pembinaan.
- e. Penggerakan emosi kelompok target dengan memanfaatkan iklim/keadaan tertentu dengan menciptakan gambaran musuh bersama. Investasi haruslah dilakukan dalam bidang kehumasan dan bagi pembinaan.

2.12.3. Pemasaran Politik

Pemasaran politik adalah sebuah konsep baru yang belum begitu lama dikenal dalam kegiatan politik . ia merupakan konsep yang di introdusir dari penyebaran ide-ide social di bidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran kesadaran, sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru. Cara penyebaran seperti ini dilihat dari konteks dan orientasinya diserbu ‘ pemasaran social ’ yang

secara substansif tidak jauh beda dengan istilah penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye.

Pemasaran social berorientasi pada upaya untuk memasyarakatkan ide-ide social terutama dalam hal perubahan perilaku masyarakat untuk menerima pembaharuan. Oleh sebab itu, politik yang berisi pemikiran pembaruan seperti demokrasi dan pembentukan suatu system pemerintahan yang lebih baik (*good govermance*) dapat digolongkan sebagai produk social yang perlu dimasyarakatkan (disosialisasikan). Jika demikian apakah politik biasa dipasarkan untuk menarik perhatian masyarakat (disosialisasikan). Jika demikian apakah politik biasa dipasarkan untuk menarik perhatian masyarakat pemilih untuk memahami cita-cita, program dan kandidat (calon) yang diajukan. Wiebe dalam Kotler (1989) menyatakan jika barang komersial seperti pasta gigi dan semacamnya dapat dipasarkan dalam masyarakat, mengapa tidak ide-ide social seperti cita cita, program calon yang diajukan partai tidak bias disosialisasikan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemasaran, “ why can’t you sell brotherhood like you sell soap?”

2.13. Pembagian Ke Dalam Daerah-Daerah Pemilihan

Pada dasarnya, daerah pemilihan dibagi ke dalam distrik-distrik pemilihan yang dibedakan berdasarkan ukurannya (jumlah wakil yang akan dipilih): distrik pemilihan tunggal, kecil, menengah dan besar. Sangat jarang ada kasus di mana seluruh daerah pemilihan membentuk sebuah distrik pemilihan saja, meskipun hal ini bisa saja terjadi, khususnya dalam pemilu regional dan lokal – atau bahkan

dalam kasus-kasus tertentu, juga di tingkat nasional. Penetapan distrik pemilihan akan sangat menentukan hasil pemilu dan dapat dimanipulasi secara besar-besaran. Jenis manipulasi yang sewenang-wenang terhadap penetapan distrik pemilihan – yang dilakukan untuk memberikan keuntungan tertentu bagi sebuah partai – bahkan memiliki istilahnya sendiri yaitu “*gerrymeandering*”.

Melalui pembagian distrik pemilihan dan pembobotan setiap distrik pemilihan upaya untuk mengamankan kehadiran parlemen di dalam masyarakat yang heteroge untuk kelompok etnis, penutur bahasa atau agama tertentu akan berhasil, tanpa harus memberlakukan sebuah sistem kuota. Hal ini hanya akan berfungsi jika wilayah domisili kelompok-kelompok tersebut jelas dan terpisah. Penentuan distrik pemilihan secara virtual yang digunakan misalnya untuk memberikan keterwakilan di dalam parlemen kepada warga yang tinggal di luar negeri adalah suatu hal yang bisa terjadi namun jarang.

2.13.1. Bersaing Dalam Pemilu

Ada berbagai cara bagaimana pemilu dikompetisikan. Perbedaan pertama adalah antara calon tunggal dan daftar calon. Daftar calon dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis:

Daftar calon tertutup, berarti bahwa pemilih hanya dapat memberikan suaranya tanpa bisa mengubah daftar calon yang ada. Dengan demikian, partai atau kelompok yang menyusun dan mengajukan daftar ini akan memperoleh kekuasaan yang besar, karena merekalah yang menetapkan nomor urut kandidat dalam daftar ini. Secara strategis bagi para kandidat hal ini berarti bahwa mereka harus merasa

mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dibanding pemilih. Karena hanya partai yang menentukan apakah seseorang memperoleh tempat seperti yang sudah tertera di dalam daftar atau tidak.

Daftar calon terbuka, berarti bahwa pemilih dapat mengubah susunan para kandidat atau memberi suara berdasarkan preferensi atau dapat juga mencoret kandidat dari dalam daftar. Di sini pemilih dapat mempengaruhi pemilihan kandidat secara terbatas. Pengaruh partai dan kelompok menjadi berkurang, pengaruh pemilih meningkat.

Daftar calon bebas berarti bahwa pemilih dapat memberikan beberapa suara kepada seorang kandidat (kumulasi) atau memilih kandidat dari beberapa daftar yang berbeda (*panachage* atau pemilihan silang). Pemilih dalam sistem seperti ini memiliki peluang yang besar untuk memberikan pengaruh; tetapi ini juga masih tergantung pada jumlah suara yang dapat diberikan. Selain itu juga ada bentuk kombinasi daftar, seperti misalnya yang terikat pada distrik pemilihan tertentu dan yang tidak terikat pada distrik pemilihan. Biasanya ini menyangkut pemanfaatan suara sisa yang tidak dibutuhkan untuk sebuah kursi.

Melalui relasi ini sisa suara pada distrik pemilihan seperti itu dipindahkan kepada distrik pemilihan yang masih membutuhkan suara untuk sebuah mandat.

2.13.2. Pemberian Suara

Di sini ditetapkan jumlah suara yang dapat didaftar oleh pemilih (pemberian suara tunggal, pemberian suara jamak). Dalam pemberian suara jamak, jumlah suara yang diberikan sama dengan jumlah wakil yang bisa dipilih dalam sebuah distrik pemilihan, atau kurang dari itu (pemberian suara terbatas).

Dalam hubungannya dengan peraturan mengenai pencalonan diri sebagai kandidat, pemilih berhak atas pemberian suara preferensi atau alternatif, yakni ia dapat mengakumulasi atau membagi suaranya (*panachage*) kepada beberapa kandidat. Pendataan surat suara disusun menurut peraturan pemungutan suara atau pencalonan kandidat. Karena itu keduanya memiliki nilai strategis yang sangat signifikan untuk penyusunan daftar kandidat dan jalannya kampanye.

2.13.3. Rumus Penghitungan Suara

- a. Rumus penghitungan suara antara lain ditentukan oleh pembagian distrik pemilihan, prosedur pencalonan kandidat dan pemberian suara. Kesemuanya memiliki variabel-variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi sebuah sistem pemilu:
- b. Hasil keputusan didasarkan pada: perwakilan distrik atau proporsional
- c. Tingkat penghitungan: distrik pemilihan, gabungan distrik pemilihan, daerah, kota
- d. Metode pembagi (d'Hondt) atau sistem penghitungan angka pemilu (Hagenbach-Bischoff)
- e. Pemanfaatan suara sisa atau suara yang berlebih
- f. Aturan *threshold* (ambang batas) parlementer, alami dan buatan

Metode pembagi yang paling terkenal adalah metode **d'Hondt**. Suara sah yang diperoleh akan dibagi berdasarkan deret bilangan pembagi 1,2,3,4 dan seterusnya. Jumlah kursi yang tersedia dialokasikan untuk masing-masing partai berdasarkan angka-angka tertinggi, menurut tingginya hasil pembagi yang diperoleh. Sebuah metode angka tertinggi lainnya adalah yang diperkenalkan oleh

Saint Lague/Schepers, yang penghitungannya didasarkan pada angka tertinggi. Dalam metode ini, suara yang diperoleh setiap partai dibagi dengan angka 0,5; 1,5; 2,5; ... $n-0,5$, dan jumlah kursi yang dibagikan didasarkan pada urutan angka tertinggi yang diperoleh.

Metode penghitungan angka pemilu yang paling populer adalah metode **Hagenbach-Bischoff**. Angka pemilu di sini diperoleh dari jumlah suara sah, dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia di distrik pemilihan ditambah satu. Angka pemilu menurut **Hare** adalah jumlah suara sah yang diperoleh, dibagi dengan jumlah kursi di distrik pemilihan yang bersangkutan.

Sebuah variasi lain untuk metode penghitungan angka pemilu diperkenalkan oleh ahli matematik **Niemayer**, yang didasarkan pada sistem proporsi matematis. Jumlah suara sah yang diperoleh partai dikalikan dengan jumlah kursi, dan hasilnya dibagi dengan seluruh jumlah suara sah yang diperoleh. Partai akan memperoleh kursi sesuai dengan jumlah bilangan bulat dari hasil perhitungan tersebut. Kursis yang tersisa akan dibagikan berdasarkan tingginya angka dibelakang koma (desimal).

Contoh pembagian kursi berdasarkan d'Hondt. Ada dua belas kursi yang akan dibagikan. Jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu adalah empat partai. Partai A memperoleh suara 36324 suara, partai B 30972 suara, partai C 24048 suara dan partai D 7200 suara.

2.14. Model Komunikasi

Teori Komunikasi Menurut Harold Lasswell (1948) merupakan teori komunikasi . Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatic (paradigmatic question) Lasswell itu merupakan unsur – unsur proses komunikasi, yaitu communicator (komunikator), Message (Pesan), Media (Media), Receiver (Komunikan / Penerima), dan Effect (Efek). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran – saluran tertentu baik secara langsung / tidak langsung dengan maksud memberikan dampak / effect kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Yang memenuhi 5 unsur *who, sayswhat, in which channel, to whom, with what effect.*

2.16. Bagian Proses Komunikasi

1. Who (Siapa / Sumber)

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu, pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator .Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator.

2. Says What (Pesan)

Says menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi.apa yang akan disampaikan / dikomunikasikan kepada penerima(komunikan),dari sumber(komunikator) atau isi informasi.Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan,nilai,gagasan/maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna,symbol untuk menyampaikan makna,dan bentuk/ organisasi pesan.

3. In which channel (saluran/media)

Saluran/media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalu media cetak/elektronik).

4. To whom (siapa/penerima)

Sesorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi atau suatu Negara yang menerima pesan dari sumber.Hal tersebut dapat disebut tujuan (destination), pendengar (listener), khalayak (audience), komunikan, penafsir, penyandi balik (decoder).

5. With what effect (dampak/efek)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

2.17. Kerangka Konsep

Konsep utama dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi politik . Strategi komunikasi politik dalam hal ini strategi komunikasi politik yang dilakukan tim pemenangan pasangan dulmusrid, untuk memudahkan tentang hasil utama penelitian ini . maka strategi komunikasi politik. Di turunkan dalam bentuk kategori sebagai berikut.

1. Komunikator
2. Pesan
3. Media
4. Komunikan
5. Umpan balik

2.18. Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan ,mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses manajemen strategis dapat dilakukan dengan cara memilih beberapa alternative keputusan dan tindakan yang diambil di tingkat manajemen bisnis dengan melakukan konsultasi seluruh level manajemen untuk melakukan seluruh aktivitas panjang dari organisasi.

Untuk mencapai keberhasilan dari proses manajemen strategis organisasi dapat dilakukan melalui perencanaan strategis dengan melaksanakan penyusunan dan pengembangan strategi.beberapa pendekatan dan teknik analisa strategis dapat digunakan untuk menyusun dan mengembangkan perencanaan strategi dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi akan membawa dampak yang

merugikan maupun yang menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada kelangsungan hidup organisasi. Dengan demikian, proses manajemen strategis diharapkan dapat membantu organisasi dalam menghadapi dampak dari dinamika perubahan lingkungan organisasi akan membawa dampak yang merugikan maupun yang menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada kelangsungan hidup organisasi. Dengan demikian, proses manajemen strategis diharapkan dapat membantu organisasi dalam menghadapi dampak dari dinamika perubahan lingkungan organisasi akan membawa dampak yang merugikan maupun yang menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada kelangsungan hidup organisasi. Dengan demikian, proses manajemen strategis diharapkan dapat membantu organisasi dalam menghadapi dampak dari dinamika perubahan lingkungan.

Sebuah organisasi atau partai harus pandai berinovasi. Inovasi ini untuk menghadapi kondisi perubahan lingkungan external yang tidak selalu stabil. Oleh karena itu, organisasi dan partai politik dengan selalu berinovasi akan selalu eksis di setiap perubahan zaman. Berbagai macam tantangan maupun ancaman yang selalu ada, misalnya munculnya partai-partai baru yang menuntut untuk melakukan inovasi dari partai-partai yang ikut kontestasi. Begitu juga seorang kandidat harus pandai berinovasi dalam menghadapi lingkungan dan perilaku pemilih yang semakin menampakkan sikap rasionalitas dalam menentukan hak suaranya. Bukti nyata bahwa seorang kandidat mampu berinovasi adalah ia bisa menyesuaikan

dimana dan kapanpun berada, dan yang terpenting ialah masyarakat masih yakin dan percaya terhadapnya dengan wujud terpilih dalam kontestasi di pilkada.

2.18.1. Unsur Komunikasi Politik

Dalam proses komunikasi yang bagaimanapun bentuknya, baik yang sederhana dalam bentuk komunikasi antar personal maupun dalam bentuk yang lebih kompleks yaitu komunikasi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga, dalam bentuk internal ataupun eksternal, maka tidak akan terlepas dari unsur-unsur komunikasi. Menurut Sumarno (1989:15) menyatakan bahwa unsur-unsur dalam komunikasi pada umumnya terdiri dari : komunikator, komunikan, message (pesan), media, tujuan, efek dan sumber komunikasi.

2.19. Komunikator Dan Komunikan

Unsur yang paling menentukan dalam setiap bentuk komunikasi yaitu unsur komunikator dan komunikan. Kedua unsur ini mempunyai daya tarik menarik yang kuat, karena keduanya merupakan dua unsur yang berbeda dalam nilai dan fungsinya. Namun demikian yang paling esensial dalam komunikasi politik yaitu bagaimana menserasikan kedua fungsi yang berbeda tersebut agar tumbuhnya situasi dan keadaan saling menguntungkan, baik dalam komunikasi internal atau komunikasi yang berlangsung dalam lingkup negara maupun komunikasi eksternal yaitu melintas batas wilayah negara. Komunikator politik dapat dibedakan dua macam (Sumarno, 1989:18) yaitu pemerintah dan negara. Perbedaan ini untuk menentukan kegiatan komunikasi yang berlangsung di dalam lingkup internal dan kegiatan di luar atau ke luar. Komunikasi internal yaitu

komunikasi dalam batas lingkup Negara sedang komunikasi eksternal (keluar) yaitu komunikasi berlangsung melintasi batas wilayah negara.

Negara dan pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut ; negara bersifat abadi, mempunyai suatu kedaulatan serta merupakan kesatuan politik yang didalamnya termasuk pemerintah. Menurut Miriam Budiardjo (2000:9) menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Sedangkan pemerintah merupakan organisasi tidak bersifat abadi, dapat berganti-ganti, bersifat konkrit dan mempunyai kekuasaan serta bagian dari unsur negara. Dengan adanya perbedaan ini mempermudah didalam menentukan komunikator dalam komunikasi internal maupun eksternal. Berdasarkan pengertian antara pemerintah serta Negara.

Untuk menentukan komunikator politik Sumarno (1898:19) berpendapat terdapat 4 (empat) ciri komunikator politik sebagai berikut :

- a. Yang pertama-tama mempunyai inisiatif
- b. Yang mempunyai ide atau gagasan (ideal objectives) yang akan disebarluaskan
- c. Yang mula pertama mengajak berkomunikasi
- d. Yang bermaksud mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap, pendapat dan tingkah laku orang lain baik secara perorangan maupun .

Berdasarkan karakteristik tersebut maka komunikator dalam komunikasi politik dapat berupa perorangan atau individu, kelompok, organisasi atau

lembaga. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Dan Nimmo (1993:28) yang menyatakan bahwa semua unsur yang terlibat dalam setting politik maka disebut sebagai komunikator politik. Oleh karena itu maka yang menjadi komunikator politik tidak hanya pemerintah, negara, masyarakat tetapi lebih menekankan pada posisi mereka serta mengatakan apa.

Organisasi atau institusi merupakan komunikator politik yang tergolong lazim berperan dalam komunikasi politik. Partai politik adalah contoh dari organisasi yang banyak mengambil peran dalam proses-proses komunikasi politik. Secara berkala organisasi politik menyelenggarakan rapat, konferensi atau muktamar. Didalam muktamar biasanya dibicarakan perihal-perihal internal organisasi serta tanggapan-tanggapan atau posisi-posisi pendirian organisasi terhadap persoalan-persoalan eksternal organisasi yang berkaitan dengan konstituen maupun masyarakat secara luas. Di penghujung konferensi biasanya dibacakan keputusan yang baru saja dihasilkan. Media massa meliput atau melaporkannya kepada publik atau konstituen. Publik atau konstituen menjadi tahu (melalui media massa) mengenai posisi-posisi, sikap dan pandangan resmi organisasi . berkenaan dengan persoalan-persoalan penting yang sedang berkembang. Dengan demikian maka organisasi berperan sebagai komunikator dalam komunikasi politik.

Seperti halnya komunikator politik, maka komunikasi politik dapat berupa perorangan atau individu, kelompok, organisasi atau lembaga. Apabila kita sepakat bahwa komunikasi merupakan proses mempengaruhi dan dipengaruhi, maka komunikasi politik merupakan bagian yang dipengaruhi oleh unsur

komunikator. Berdasarkan penjelasan akan komunikator dan komunikan tersebut maka fungsi komunikator dan komunikan harus saling mengisi dan merupakan interdependensi yang positif, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan harmonis.

Kaitannya dengan interdependensi ini Davis K. Berlo (dalam Sumarno, 1989:21) membagi dalam dua bentuk yaitu :

Interdependensi fisik. Interdependensi dimana fisik komunikator dan komunikan langsung mengadakan komunikasi. Apabila salah satu tidak hadir maka tidak akan berlangsung proses komunikasi. Interdependensi fisik ini biasanya dalam kegiatan *direct communication* dimana komunikator dan komunikan berhadapan secara langsung dalam arti fisik. *Interdependensi aksi-aksi.* Interdependensi dimana

terdapatnya arus balik dari komunikan sebagai reaksi terhadap pesan yang diberikan komunikator, sehingga komunikator memberikan pesan kedua sebagai penguatan terhadap pesan pertama. Arus balik ini merupakan bahan evaluasi komunikator terhadap efektif tidaknya komunikasi yang dilancarkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian .

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode

deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sugiyono (2005:15) menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode ini cocok dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha mencari gambaran satu kelompok manusia untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, sehingga fenomena kelompok tersebut dapat terungkap secara jelas dan akurat.

3.2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, yaitu menggambarkan tentang bagaimana strategi politik yang dilakukan Tim pemenangan Dulmusrid - Sazali dalam memenangkan pemilukada di Kabupaten Aceh Singkil 2017. Penelitian Deskriptif telah menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi dilapangan. Khususnya terkait pada memanfaatkan strategi untuk memenangkan pemilukada oleh Tim pemenangan Dulmusrid - Sazali di Kabupaten Aceh Singkil, serta memberikan gambaran tentang faktor-faktor

strategis apa yang akan digunakan Tim pemenangan Dulmusrid - Sazali dalam memenangkan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Singkil. Alasan menggunakan penelitian ini untuk melihat sebuah konsep dan teori dalam realitanya yang ada dilapangan.

Dasar penelitian ini adalah metode kualitatif, karena metode kualitatif memiliki varian yang beragam untuk menganalisis secara mendalam gejala yang terjadi serta objek yang akan diteliti, agar dapat melihat kenyataan-kenyataan yang ada pada objek penelitian sehingga peneliti dapat menjelaskan kenyataan secara ilmiah.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan untuk memperoleh informasi. Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara dengan Informan, yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan mendalam. Informan terpilih yaitu:

a. Dulmusrid

Peneliti memilih informan tersebut Karena peneliti menganggap bahwa informan tersebut mampu dan sangat berkompeten dalam membantu peneliti

untuk mencari tahu masalah yang sedang peneliti teliti yakni, sejauh mana peran partai dalam memaksimalkan suara calon Pemilukada di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017. Peneliti juga mengambil informan tersebut karena informan tersebut merupakan Calon Bupati Aceh Singkil 2017-2022 & Ketua DPD II GOLKAR Kab.Aceh Singkil.

b. Yulihardin

Peneliti memilih informan ini karena dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan dari peneliti berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh peneliti serta informan tersebut merupakan Ketua Tim Pemenangan yang ikut memenangkan calon yang didukungnya dan beliau juga Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) & Ketua DPD II PARTAI PAN , KETUA TIM FORMATUR 2016-2021 Kab.Aceh Singkil.

2. Observasi Langsung

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.Observasi ini membantu peneliti dalam menganalisa keadaan yang sebenarnya.

3. Dokumentasi / Studi Pustaka

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh langsung dari informan.Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui

tulisan-tulisan yang pernah ada tentang strategi partai dalam memenangkan pemilihan umum kepala daerah.

3.4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua tim pemenangan dan pasangan calon bupati dan wakil bupati aceh singkil.

3.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya Sugiyono (2015:137). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi/gabungan. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (key instrumen) dalam pengumpulan data dan menginterpretasi data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Hal mana senada dengan Moleong (2000:9) yang mengemukakan bahwa Dalam peneliti kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat bantu bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan.

Dengan demikian peneliti lebih leluasa dalam mencari informasi dan data yang terperinci dari subjek penelitian tentang berbagai hal yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, peneliti mengadakan observasi dan wawancara mendalam atau menyebar kuisisioner berupa pertanyaan, dengan asumsi bahwa hanya manusia yang dapat memahami makna interaksi sosial, menyelami perasaan dan nilai-nilai yang dapat terekam dalam ucapan dan perilaku responden. Peneliti sendiri adalah sebagai pengkontruksi realitas atas dasar pengamatan dan pengalamannya di lapangan.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya penuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2015:245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.”

Analisis data data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi dilapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2015:246). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Tiga jenis kegiatan utama analisis data merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk lebih memperjelas alur kegiatan analisis data penelitian tersebut.

3.7.1. Paradigma Penelitian dan Pemaknaannya

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Dengan mengambil paradigma konstruktivisme maka penelitian ini memiliki konsekuensi bahwa dimensi ontologis, epistemologi dan metodologis haruslah sesuai dengan paradigma ini, Salim (2006:64). Menurut Salim (2006:64) paradigma konstruktivisme :

“secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada pihak yang melakukannya, oleh karena itu, realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang sebagaimana yang biasa dilakukan dikalangan positivis atau post-positivis. Atas dasar filosofis ini, aliran ini menyatakan bahwa hubungan epistemologi antara pengamat dan objek merupakan satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya. Secara metodologis, aliran ini menerapkan metode hermeneutika dan dialektika dalam proses mencapai kebenaran.”

Sedangkan menurut Yvonna S. Loncoln dalam Salim (2006:88) menyatakan bahwa selama awal perkembangannya, konstruktivisme mengembangkan sejumlah indikator sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu. Adapun beberapa indikator tersebut yaitu mengedepankan metode kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data, mencari relevansi dari indikator kualitas untuk lebih memahami data lapangan, teori yang

digunakan harus lebih membumi, unit analisis yang digunakan berupa pola-pola dan kategori jawaban serta penelitian yang dilakukan lebih bersifat partisipatif. Dengan demikian maka paradigma konstruktivisme memandang ilmu social sebagai analisis sistematis tas *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah, agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial.

3.7.2. Teknik Cuplikan (*Sampling*)

Dalam penelitian kualitatif istilah sampel tidak lazim digunakan. Pasalnya, setiap subjek adalah informan yang akan dilihat sebagai kasus dalam suatu kejadian tertentu. Sesuai karakter pendekatan kualitatif yang lebih "investigatif", maka pengambilan sampel dalam studi kualitatif lebih ditekankan pada kualitas sampel dan bukan pada jumlah atau kuantitasnya. Secara umum prosedur pengambilan sampel dalam studi kualitatif menurut Salim (2006:12) memiliki karakter sebagai berikut : "(1) tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kekhususan kasus (spesifik) sesuai dengan masalah penelitian, (2) tidak ditentukan secara kaku sejak awal, namun bisa berubah "ditengah jalan" sesuai pemahaman dan kebutuhan yang berkembang selama proses studi, dan (3) tidak diarahkan pada keterwakilan/representasi, melainkan pada kecocokan pada konteks(siapa dengan jenis informasi apa)".

Hal demikian tidak berarti bahwa sampel dan kaidah-kaidah penarikan sampel tidak dibutuhkan sama sekali dalam penelitian komunikasi kualitatif, tetapi hal yang lebih dibutuhkan oleh peneliti adalah keterwakilan substansi dari

data atau informasi. Informasi dalam penelitian komunikasi kualitatif merupakan data penelitian yang kemudian divalidasi oleh peneliti dengan teknik triangulasi. Sesuai dengan yang diutarakan oleh Pawito (2007:90) menyatakan bahwa dalam penelitian komunikasi kualitatif, penarikan sampel meliputi dua unsur yaitu *sampling unit* dan *sampling technique*. Sampling unit berkenaan dengan apa yang sesungguhnya hendak diwakili sedangkan *sampling technique* berkenaan dengan bagaimana menentukan siapa yang menjadi wakil.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara geografi Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2°02"-2°27'30" Lintang Utara dan 97°04"-97°45'00" Bujur Timur dengan ketinggian yang bervariasi dari permukaan laut sesuai dengan kecamatannya ini, maka dibagi menjadi 2 (dua) wilayah yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah kepulauan banyak. Wilayah daratan yang terluas di kabupaten Aceh Singkil adalah Simpang Kanan yang memiliki luas wilayah yaitu 289,96 km² atau 15,61% dari luas wilayah kabupaten. Sementara

kepulauan banyak yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan yang di kolaborasikan memiliki luas wilayah 293,65 km² atau 15,81% dari luas wilayah kabupaten.

Gambar 4.1.1. Peta Kabupaten Aceh Singkil



Aceh Singkil yang sebagian wilayahnya berada di kawasan gunung Leuser memiliki luas 1.857,88 km² yang terdiri dari 11 kecamatan, 120 desa definitiv Dengan batas-batas berikut:

Tabel 4.1.1. Batas Wilayah Aceh Singkil

| Sebalah Utara | Berbatasan Dengan Kota Subulussalam |
|------------------------|---|
| Sebeleh Timur | Berbatasan Dengan Provinsi Sumatra Utara |
| Sebelah Selatan | Berbatasan Dengan Samudra Indonesia |
| Sebelah Barat | Berbatasan Dengan Trumon Kabupaten Aceh Selatan |

4.1.1. Dataran

Melihat dari sisi topografi, wilayah Kabupaten Aceh Singkil berada di daerah pesisir dan daerah sebelah utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0% – 8 %.Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir

merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8% – 30%. Sebagian kewasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Singkil berada di antara ketinggian 0 m – 100 m dpl. Daerah pesisir di sebelah selatan dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0 m – 5 m dpl. Sedangkan pada daerah di sebelah utara memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5 m – 100 m dpl.

4.1.2. Perbukitan

Secara geologi, bagian utara Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dengan fisiografi wilayah perbukitan yang didominasi oleh sistem perbukitan berupa bukit lipatan. Diantara bukit-bukit terdapat sungai dan anak-anak sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia. Pada bagian selatan, fisiografi terdiri atas dataran aluvial sungai dan endapan pasir laut yang sebagian besar merupakan ekosistem rawa yang unik. Di samping itu, terdapat juga bahan induk tanah berupa bahan organik yang sebagiannya telah terdekomposisi membentuk gambut. Pada bagian selatan juga terdapat daerah kepulauan yang umumnya didominasi oleh bahan induk bukit kapur dan endapan pasir.

Sebagai daerah yang dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang diperkirakan bergeser sekitar 11 mm/thn maka wilayah Kabupaten Aceh Singkil termasuk dalam daerah dengan resiko bencana yang tinggi sebagai akibat dari proses geologis, terutama pada bagian selatan yang merupakan daerah pesisir pantai. Konsekuensinya, wilayah Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Disamping itu, bagian utara wilayah kabupaten

merupakan daerah yang rawan erosi karena sebagian besar material pembentuk tanah terdiri dari bahan induk berupa batuan liat, batu kapur, dan pasir kuarsa. Beberapa kawasan rawan gelombang pasang (rob) dan abrasi pantai adalah Kecamatan Singkil meliputi Kampung Pulau Sarok, Kecamatan Singkil Utara meliputi Kampung Gosong Telaga Selatan, Gosong Telaga Utara, GosongTelaga Timur, Gosong Telaga Barat dan Ketapang Indah, Kecamatan Kuala Baru meliputi Kampung Kuala Baru Laut, Kuala Baru Sungai dan Kayu Menang, Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat.

4.1.3. Iklim

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Singkil termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Berdasarkan data tahun 2011 terdapat 36 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 2.12,5 mm/bulan.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2014 adalah 112.161 jiwa yang terdiri dari 56.589 jiwa laki-laki dan 55.572 jiwa perempuan. Persentase penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebesar 29,88% dan Sedangkan persentase penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu sebesar 2,12%. Komposisi umur penduduk didominasi oleh balita dan remaja yang pada suatu saat akan berada pada posisi usia produktif. Laju pertumbuhan jumlah penduduk (*population growth rate*) di Kabupaten Aceh

Singkil setiap tahunnya rata-rata 2,99% jika mengacu kepada data penduduk dari tahun 2006 sampai dengan 2011 yang terangkum dalam data Badan Pusat Statistik

4.1.4. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2014 adalah 112.161 jiwa yang terdiri dari 56.589 jiwa laki-laki dan 55.572 jiwa perempuan. Persentase penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebesar 29,88% dan Sedangkan persentase penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu sebesar 2,12%. Komposisi umur penduduk didominasi oleh balita dan remaja yang pada suatu saat akan berada pada posisi usia produktif.

Laju pertumbuhan jumlah penduduk (*population growth rate*) di Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya rata-rata 2,99% jika mengacu kepada data penduduk dari tahun 2006 sampai dengan 2011 yang terangkum dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil 2012. Dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terbangun 119.895 Ha dan jumlah penduduk yang mendiami 112.161 jiwa maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Singkil adalah sebanyak 60 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pulau Banyak sebanyak 194 jiwa/Km² sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Pulau Banyak Barat sebanyak 15 jiwa/Km². Jumlah rumah tangga di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2014 adalah 25.381 rumah tangga. Secara rata-rata banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga adalah 4 orang. Rata-rata anggota rumah tangga dalam satu rumah tangga untuk setiap kecamatan dapat dikatakan seragam (homogen).

TABEL. 4.1.2 PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN

JENIS KELAMIN

| Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0-4 | 5,758 | 5,152 | 10,910 |
| 5-9 | 5,329 | 5,004 | 10,333 |
| 10-14 | 5,705 | 5,543 | 11,248 |
| 15-19 | 7,526 | 7,834 | 15,360 |
| 20-24 | 5,442 | 5,316 | 10,758 |
| 25-29 | 5,563 | 5,381 | 10,944 |
| 30-34 | 5,380 | 5,434 | 10,814 |
| 35-39 | 4,841 | 5,357 | 10,198 |
| 40-44 | 4,726 | 4,657 | 9,383 |
| 45-49 | 3,910 | 3,795 | 7,705 |
| 50-54 | 2,787 | 2,939 | 5,726 |
| 55-59 | 2,459 | 2,602 | 5,061 |
| 60-64 | 2,056 | 2,449 | 4,505 |
| 65+ | 3,929 | 5,233 | 9,162 |
| Jumlah | 65,411 | 66,696 | 132,107 |

Sumber : Kabupaten Aceh Singkil 2017

Berdasarkan tabel di atas maka akan kita ketahui bersama jumlah penduduk yang wajib memilih atau memiliki hak pilih pada pemilihan umum yang akan datang, sehingga objek kampanye dan target kemenangan setiap pilkada atau partai politik akan diketahui dengan akurat. Penduduk Kab.aceh singkil yang memiliki hak pilih sebanyak 99,616 jiwa yang terdiri dari 48,619 jiwa laki-laki dan 50,997 perempuan.

Penduduk Kab.aceh singkil merupakan salah satu masyarakat yang heterogen, layaknya komunitas masyarakat lainnya dimana dalam komunitas masyarakat itu terbagi kedalam kelompok-kelompok tertentu seperti berdasarkan agama, pendidikan, usia dan masih banyak yang lain. Namun demikian posisi Kab.aceh singkil yang berada di posisi transisi antara kota dan desa ditunjang dengan bermacam-macamnya kelompok masyarakat mengakibatkan dinamika

sosial budaya masyarakatnya sangat dinamis, hal ini dapat dilihat dari tingkat peran serta masyarakat terhadap proses pembangunan yang berlangsung.

Pendidikan merupakan faktor utama penentu pola pikir masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat maka akan memberi pengaruh terhadap lingkungannya, namun apabila tingkat pendidikannya rendah maka akan memberi pengaruh terhadap lingkungannya namun tidak setinggi atau tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan orang atau masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Melalui pendidikan maka pola pikir orang akan terbentuk dan cenderung akan kritis terhadap pembangunan yang sedang berjalan.

Kab.aceh singkil memiliki jumlah penduduk yang terbagi kedalam kelompok tingkat pendidikan yang bervariasi, sehingga pengaruh terhadap pemerintah pun bervariasi.

4.2. Kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Aparatur pemerintahan memiliki posisi yang sangat strategis bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, dimana sesuai dengan Undang undang tentang Pemerintahan Daerah memiliki fungsi sebagai pelayan masyarakat. Untuk mewujudkan itu maka penampilan aparatur harus selalu tampil prima baik secara kelembagaan maupun secara kompetensi aparatur. Sebagai salah satu wilayah yang tidak terlepas oleh NKRI maka Pemerintah Kab.Aceh Singkil sayangnya melaksanakan semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan pelaksanaan.

Oleh karena itu disaat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah Kab.Aceh Singkil berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan ketentuan peraturan itu yang dilatar belakangi oleh adanya keinginan yang luhur untuk mewujudkan sebuah kelembagaan organisasi birokrasi yang miskin struktur tetapi kaya fungsi guna mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat. Sejak 2008 maka kelembagaan pemerintah daerah kab.aceh singkil telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 tersebut. Untuk menunjang hal tersebut maka tingkat pendidikan atau kompetensi dari aparatur Pemerintah kab.aceh singkil juga memiliki peran yang strategis. Melalui pendidikan inilah nantinya akan menciptakan inovasi dan kreasi kebijakan yang diambil guna peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Guna mengetahui kelembagaan serta kondisi riil PNS Pemerintah Kab.Aceh Singkil .

TABEL 4.2.1. PNS Pemerintah Kab.Aceh Singkil Berdasarkan Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-------|--------------------|--------|
| (1) | (2) | (7) |
| 1 | SD | 160 |
| 2 | SLTP-UMUM | 200 |
| 3 | SLTP-Kejuruan | 18 |
| 4 | SLTA | 1154 |
| 5 | D-1 | 59 |
| 6 | D-2 | 380 |
| 7 | D-3 | 492 |
| 8 | D-4 | 28 |
| 9 | S1 | 1881 |
| 10 | S2 | 110 |
| 11 | S3 | 0 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Aceh Singkil : 2017

Berdasarkan tabel di atas maka pendidikan PNS Pemerintah Kab.Aceh Singkil rata-rata ber ijazah S-1 kemudian SLTA dan yang terakhir yaitu ber ijazah D-3. Adapun kondisi PNS Pemerintah Kab.Aceh Singkil berdasarkan golongan dan eselon pada jajaran birokrasi dan kita lihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 4.2.3 Kondisi PNS Pemerintah Kab. Aceh Singkil
Berdasarkan Golongan dan Eselon.**

| No | Golongan | Jumlah |
|-------|----------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Juru Muda (I/a) | 74 |
| 2 | Juru Muda Tk. I (I/b) | 0 |
| 3 | Juru (I/c) | 100 |
| 4 | Juru Tk. I (I/d) | 10 |
| 5 | Pengatur Muda (II/a) | 592 |
| 6 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 144 |
| 7 | Pengatur (II/c) | 241 |
| 8 | Pengatur Tk. I (II/d) | 204 |
| 9 | Penata Muda (III/a) | 597 |
| 10 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 385 |
| 11 | Penata (III/c) | 304 |
| 12 | Penata Tk. I (III/d) | 472 |
| 13 | Pembina (IV/a) | 983 |
| 14 | Pembina Tk. I (IV/b) | 153 |
| 15 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 15 |
| 16 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 1 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab.Aceh Singkil 2017

Berdasarkan tabel di atas maka, PNS Pemerintah Kab. Aceh Singkil saat ini terkonsentrasi pada golongan III. Kondisi ini merupakan indikasi tidak sehatnya pola karier dan penataan sumber daya aparatur di Pemerintah Kab.Aceh Singkil, idealnya komposisi antara golongan I, II, III dan IV berbentuk piramida, sehingga akan memudahkan penataan dan penyusunan pola karier. Untuk mengatasi akan hal tersebut maka sayangnya penataan pola karier didasarkan

kepada kompetensi PNS serta pemberlakuan analisis jabatan di seluruh instansi Pemerintah Kab.Aceh Singkil. Produktivitas seorang aparatur atau PNS selain dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang kondusif (penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pola karier) serta tingkat pendidikan, juga dipengaruhi oleh factor usia. Tingkat produktivitas berbanding terbalik dengan faktor usia, semakin tua seorang PNS maka dimungkinkan produktivitasnya menurun tetapi jika PNS mempunyai usia yang masih muda dimungkinkan 100 produktivitasnya masih tinggi. Adapun gambaran usia PNS Pemerintah Kab.Aceh Singkil sebagai berikut :

TABEL 4.2.4. PNS Pemerintah Kab.Aceh Singkil Berdasarkan Usia

| No | Usia | Jumlah |
|-------|-------|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 18-20 | 1 |
| 2 | 21-25 | 211 |
| 3 | 26-30 | 548 |
| 4 | 31-35 | 472 |
| 5 | 36-40 | 668 |
| 6 | 41-45 | 858 |
| 7 | 46-50 | 972 |
| 8 | 51-55 | 713 |
| 9 | 56-60 | 99 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2017

4.3. Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Tim Pemenangan Mengetahui

Khalayak Politik

Khalayak politik sering juga disebut sebagai penerima, *receiver* atau *audience*, namun perlu dipahami bahwa sebagai status khalayak biasa saja sifatnya sesaat, karena pada saat memberi umpan balik, bisa saja justru khalayak ini berinisiatif menyelenggarakan peristiwa komunikasi. Berdasarkan apa yang

ditentukan oleh Nimmo, dalam hal ini warga aceh singkil terlibat sebagai sasaran dari komunikasi politik dalam pilkada .

4.3.1 Karakteristik Sosial

Khusus di Kabupaten Singkil, dalam karakteristik sosial kaum wanita mempunyai posisi yang istimewa dimata warganya. Dilihat dari jaringan organisasi mereka yang cukup banyak. Bergerak diberbagai bidang kesejahteraan keluarga dan bentuk-bentuk sosial lainnya yang tidak berorientasi keuntungan material. Jaringan yang paling luas adalah kumpulan para ibu desa dan simpatisan yang tersebar diseluruh dusun di kabupaten aceh singkil, mereka menamakan dirinya srikandi.

4.3.2. Legal

Kondisi geografis Kabupaten Aceh Singkil yaitu memiliki dataran rendah yang lebih luas dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pedesaan lebih mendominasi daripada perkotaan. Warga yang melakukan partisipasi dalam pilkada nampaknya telah mempertimbangkan aspek hukumnya, terkhusus bagi warga pedesaan. Hal ini terlihat pada saat memperhatikan angka partisipasi politik yang cenderung ke masyarakat pedesaan. Penggunaan hak suara lebih dimiliki oleh mereka. Perbedaan dengan warga yang tinggal di ibu kota kabupaten atau perkotaan lebih bisa menilai tentang pertimbangan hak dalam menggunakan suara bukan memposisikan sebagai kewajiban.

Warga singkil yang masih terikat dengan dogma-dogma masa lalu, yaitu intervensi partai-partai yang telah lama hadir di Indonesia. Utamanya partai Golkar. Akan tetapi terjadinya perpecahan internal partai Golkar membuat

masyarakat mulai hilang kepercayaan pada partai ini. Ini menjadikan peluang tersendiri bagi para pasangan calon yang ingin menggaet massa yang notabene loyalis partai Golkar.

4.3.3. Objek Politik

Strategi untuk menarik perhatian bagi sejumlah orang tentang sebuah peristiwa, isu, atau ide-ide terbaru. Kabupaten singkil merupakan daerah yang masih bisa dikatakan daerah sedang berkembang. Oleh karena itu isu-isu terkait pembangunan Kabupaten singkil yang lebih baik kedepannya dapat dijadikan sebagai objek politik. Akan tetapi berbeda dengan Dulmusrid dan wakilnya membuat visi misi yang lebih nyata yakni melanjutkan apa yang telah direncanakan oleh pemerintahan selanjutnya yang telah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat singkil secara keseluruhan.

4.3.4. Dukungan Modal

Dalam undang-undang memang tidak disebutkan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara langsung dipilih oleh rakyat tanpa ada perwakilan akan tetapi setelah undang-undang KPU diterbitkan 2015 lalu tentang pemilihan umum, presiden, gubernur, bupati dipilih secara langsung oleh rakyat, maka mengharuskan setiap pasangan calon harus mempunyai harta yang melimpah sebagai *cost* politik atau *political fee*. Finansial menjadi hal penting bagi setiap kandidat, oleh karena itu bagi mereka yang tidak memiliki harta kekayaan yang melimpah dengan sendirinya tersingkir dari bursa calon dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Publik mungkin sama-sama menegetahui bahwa, biaya poiltik itu tidaklah murah.

Keterbatasan biaya akan menjadi hambatan bagi mereka yang mempunyai kredibilitas dan layak mencalonkan diri di pesta demokrasi 5 tahunan ini. Kalkulasi dana dari pembelanjaan politik suatu pasangan calon bisa mencapai puluhan milyar rupiah, diantaranya pembelian partai politik sebagai kendaraan politik, persiapan pembuatan tim-rim sukses, penyediaan atribut kampanye dan masih banyak lagi. Apabila semua keperluan politik dalam sebuah kontestasi dipemilihan kepala daerah ditanggung sendiri oleh setiap pasangan calon, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan Dulmusrid Dan Sazali untuk maju sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di pilkada Singkil 2017 .

Berikut daftar jumlah kekayaan calon bupati dan wakil bupati dipilkada Aceh Singkil 2017 :

Tabel 4.3.1 Harta Kekayaan Calon Bupati & Wakil Bupati

Kabupaten Aceh Singkil

| NO | Nama Pasangan Calon Bupati | Jumlah |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | H.Safriadi,S.H & Sariman,S.P | Rp. 23.189.467.807 |
| 2 | Yakarim M & Roesman Hasmy | RP. 5.381.979.540 |
| 3 | Dulmusrid & H.Sazali,S.Sos. | Rp. 1.218.683.429 |
| 4 | Putra Ariyanto & Hendri Syahputra | Rp.5.815.581.561 |
| | Jumlah | |

Sumber : KPUD Kabupaten Aceh Singkil

4.4. Struktur Tim Pemenangan Dulmusrid-Sazali Paslon Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Aceh Singkil

1. Ketua : Yulihardin S.Ag.
2. Ketua : Frida Siska Sihombing.

3. Ketua : Taufik
4. Sekretaris : Sutan Syahrir
5. Sekretaris : Herman
6. Bendahara : Eko
7. Bendahara : Jhoni Cibro

**Gambar 4.4.1 Foto Pasangan Dulmusrid dan Sazali Paslon Bupati & Wakil
Bupati Kabupaten Aceh Singkil 2017-2022**



4.5. MISI Dan VISI Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Dulmusrid-Sazali 2017-2022. “Cerdas, Sehat Dan Sejahtera ”

1. MISI

- a. **CERDAS** " Mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Singkil memiliki kualitas, kompetensi dan keterampilan yang bernilai "
- b. **SEHAT** " Mengandung pengertian bahwa setiap komponen kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya senantiasa berada dalam keadaan yang baik "

- c. **SEJAHTERA** " Mengandung pengertian aman sentosa dan makmur serta masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu : sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan "

2. **Visi**

1. Perbaiki tata kelola pemerintahan
2. Menciptakan pendidikan berkualitas yang islami berbasis kearifan lokal
3. Menciptakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang responsif, cepat dan berkualitas merata di setiap wilayah.
4. Menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan kerakyatan.
5. Optimalisasi potensi sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan .
6. Menciptakan iklim investasi yang cepat dan kondusif memiliki kepastian hukum Menciptakan penyelesaian yang responsif terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan.

Adapun langkah strategis untuk mencapai misi tersebut adalah :

A. Perbaiki tata kelola pemerintahan yaitu:

Penempatan PNS sesuai dengan keahlian, kompetensi dan disiplin ilmunya Promosi PNS terutama bagi mereka yang berprestasi sesuai Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

B. Menciptakan Pendidikan Berkualitas Yang Islami Berbasis Kearifan Lokal

Dengan langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyebaran dan penempatan guru secara merata di setiap kecamatan

2. Pemberian beasiswa bagi siswa SMU, SMK, MAN yang berprestasi tetapi tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk melanjutkan studi.
3. Mengadakan kerja sama dengan universitas baik yang ada di Aceh maupun daerah lain untuk menerima mahasiswa Aceh Singkil .
4. Memfasilitasi pendirian Universitas Negeri di Aceh Singkil.dengan cara pendirian kampus di luar domisili.
5. Menjadikan Dinas Syariat Islam menjadi Dinas Syariat Islam dan Pembinaan Dayah dan Pemberantasan buta aksara Al'Quran.
6. Pembangunan sarana ibadah, pesantren dan dayah serta sekolah unggul .Membuka balai latihan kerja yang bangunannya sudah ada tapi belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aceh Singkil yang siap bersaing di dunia kerja .
7. Memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai sebagai pusat belajar masyarakat seperti Tempat Pengajian Alquran (TPA), tempat kursus bahasa arab dan bahasa inggris.
8. Meningkatkan kualitas aparatur birokrat yang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur Pengurusan Perizinan yang cepat dan bebas Pungli Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

C. Menciptakan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rujukan yang Responsif, Cepat dan Berkualitas Merata disetiap Wilaya

Untuk mencapai ini diperlukan langkah strategis yaitu :

1. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, dan bidan
2. Penataan Tenaga Perawat dan Keperawatan dengan menempatkan secara merata di setiap unit pelayanan kesesahatan dan kecamatan
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sehingga dapat mengurangi rujukan ke rumah sakit lain
4. Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menjadi Ikon Kesehatan untuk Pantai Barat Aceh.

D. Menciptakan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Kerakyatan

Untuk mencapai ini diperlukan langkah strategis yaitu :

1. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal
2. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBK, untuk peningkatan pembangunan yang padat karya
3. Peningkatan sektor pertanian tanaman pangan, dengan penyediaan sarana dan prasarana
4. Peningkatan sektor perkebunan dengan menjaga stabilitas harga komoditas terutama harga sawit petani
5. Peningkatan sektor Perikanan Laut dan Darat, dengan budidaya perikanan dan udang.

E. Optimalisasi Potensi Sumber Daya Lokal Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk mencapai ini diperlukan langkah strategis yaitu :

1. Membangun ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif,
3. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
4. meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
5. Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat dan Kecamatan Kuala Baru.

F. Menciptakan Iklim Investasi yang Cepat dan Kondusif memiliki Kepastian Hukum

1. Memberi peluang kemudahan rasa aman bagi investor, baik lokal maupun nasional dan internasional untuk bekerja sama dalam menanamkan modalnya
2. Mewujudkan pelayanan publik One Stop Service
3. Menyederhanakan prosedur ijin-ijin usaha dan lain-lain.

G. Menciptakan Penyelesaian yang Responsif terhadap Permasalahan

– Permasalahan Sosial dan Kemasyarakatan.

1. Menciptakan Perdamaian dan keamanan bagi seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah/Qanun, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang adil.
3. Tidak Melanjutkan Kabupaten Aceh Singkil sebagai daerah Tertinggal dan Termiskin di Indonesia (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal) .

4.6. Hasil Wawancara

Untuk mendapatkan data utama penelitian ini, peneliti telah menetapkan Narasumber yakni :

1. Dulmusrid (Bupati)
2. Ketua Tim pemenangan pasangan Dulmusrid – Sazali

4.6.1. Berikut dikembangkan hasil wawancara kepada narasumber 1 yulihardin (ketua tim pemenangan).

A. Komunikator

Pertanyaan nomor 1 siapa yang bertindak sebagai komunikator yang memberi pesan-pesan politik kepada masyarakat ?

Jawab : Berdasarkan pertanyaan tersebut, **narasumber 1** yulihardin menjelaskan bahwa tim pemenangan ini terdiri dari banyak orang jadi yang berkomunikasi kepada masyarakat itu selain tim pemenangan juga kandidat. Tim pemenangan / relawan dulsaza – sazali memberikan tentang isu perubahan kepada masyarakat.

Pertanyaan nomor 2 Siapa saja yang dijadikan komunikator / pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada masyarakat dalam sebuah proses komunikasi ?

Jawab : Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan bahwa Tim pemenangan dulmusrid-sazali yang memberikan pesan kepada masyarakat tentang isu perubahan.

Pertanyaan nomor 3 Bagaimana cara menentukan Komunikator / pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada masyarakat dalam sebuah proses komunikasi?

Jawab : Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan bahwa Yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada masyarakat dalam sebuah proses komunikasi yaitu orang yang dekat kepada masyarakat atau yang sering bergaul kepada masyarakat dan di senangi/disukai masyarakat tentu nya tau karakteristik masyarakat tersebut . orang – orang itu lah tentu nya yang dikirim untuk menjual visi dan misi si kandidat.

Pertanyaan nomor 4 Kapan saja si kandidat berkomunikasi kepada masyarakat apa isi pesan yang di sampaikan kepada masyarakat ?

Jawab : Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan bahwa si kandidat berkomunikasi kepada masyarakat kapan saja yang pada khusus nya itu ketika ada pertemuan-pertemuan kapada masyarakat.maka dibentuk lah kelompok untuk menerima pesan-pesan masyarakat.

B. Pesan

Pertanyaan nomor 5 Bagaimana cara merancang / menyusun pesan kepada masyarakat ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan pesan – pesan yang disampaikan tentu nya mudah dipahami masyarakat dan dimengerti masyarakat tentu nya tidak berbelit-belit pesan yang mereka sampaikan kepada masyarakat pesan yang disampaikan tentu harus singkat tepat padat.

Pertanyaan nomor 6 Apa isi pesan yang disampaikan ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat yaitu tentang perubahan seperti sehat,cerdas,dan sejahtera.

Pertanyaan nomor 7 apakah ada teknik/bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan bahwa Teknik yang mereka gunakan tentu nya sama dengan pilkada yang lalu, tetapi mereka menyesuaikan dengan tema yang mereka bawa yaitu tentang perubahan.

C. Media

Pertanyaan nomor 8 media apa saja yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan media yang dipakai yaitu Radio,media cetak, baliho atau poster-poster yang di sebar di wilayah kab.aceh singkil dan sekitarnya.

Pertanyaan nomor 9 bagaimana cara menentukan media tersebut ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan media tersebut sebelum ditentukan di observasi terlebih dahulu media apa saja yang mudah di pahami masyarakat kab.aceh singkil . sebagai ketua tim pemenangan dulmusrid-sazali kami sebagai tim pemenangan tentu nya secara selektif menentukan media apa saja yang harus digunakan/ dipakai.dan tentu nya persetujuan si kandidat.

Pertanyaan nomor 10 siapa yang memilih media tersebut ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan yang memilih media tersebut langsung mereka sebagai tim pemenangan dulmusrid-sazali dan mereka tentu mengkoordinasikan juga kepada si kandidat.

D. Komunikasikan

Pertanyaan nomor 11 siapa komunikannya / pihak yang penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan tentu masyarakat kab.aceh singkil yang sasaran mereka. sebagai tim pemenangan mereka lebih terfokus ke desa desa yang di luar kota singkil seperti di pulau-pulau.

Pertanyaan nomor 12 Bagaimana cara menentukan komunikannya / pihak yang penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan mereka melihat berdasarkan data yang dilapangan yang di observasi oleh tim-tim pemenangan dulmusrid-sazali.

Pertanyaan nomor 13 Kenapa memilih komunikannya tersebut / pihak yang penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan tentu dia sebagai ketua tim pemenangan mengobservasi dan memantau langsung ke daerah-daerah yang menurut dia dan teman-teman punya peluang suara yang besar untuk paslon dulmusrid-sazali.

E. Efek Umpan Balik

Pertanyaan nomor 14 Apa tanggapan masyarakat ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan tanggapan masyarakat kepada dia dan kandidat beragam ada yang pro dan kontra, kalau masyarakat yang mendukung mereka tentu nya bersemangat sebagai tim pemenangan dulmusrid-sazali.mereka mendengarkan apa yang masyarakat sampaikan , tetapi kalau yang masyarakat yang kontra tentu nya juga mereka sebagai tim pemenangan akan meng evaluasi masukan – masukan masyarakat sampaikan kepada mereka.

Pertanyaan nomor 15 apakah tanggapan tersebut di evaluasi ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** yulihardin menjelaskan tentu tanggapan/masukan –masukan masyarakat berikan kepada mereka akan mereka evaluasi mau itu yang pro atau pun yang kontra , dan tentu setiap-setiap perkembangan mereka akan evaluasi langsung sebelum mereka kampanye bersama kandidat. Dia dan tim lain akan memantau pesan-pesan tersebut agar pesan yang sampaikan kepada masyarakat bisa lebih masyarakat mengerti.

4.6.2. Berikut dikembangkan hasil wawancara kepada narasumber 2 Dulmusrid (Bupati kab.aceh singkil).

A. Komunikator

Pertanyaan nomor 1 siapa yang bertindak sebagai komunikator yang memberi pesan-pesan politik kepada masyarakat ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid menjelaskan dia sebagai calon bupati pada waktu itu dia membentuk tim pemenangan yang tugas nya untuk memberikan pesan-pesan politik yang dia bawa bersama sazali. Membawa pesan-pesan itu kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang

visi dan misi yang dia dan sazali bawa untuk merubah aceh singkil yang lebih bagus lagi.

Pertanyaan nomor 2 Siapa saja yang dijadikan komunikator / pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada masyarakat dalam sebuah proses komunikasi ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid menjelaskan tentu nya kalangan-kalangan yang dijadika komunikator orang yang berpengaruh , yang punya wawasan tinggi yang juga bisa memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat.orang yang punya potensi yang bisa memberikan kepada masyarakat.salah satu nya tokoh agama atau tokoh adat yang di setiap kampong.sehingga pesan yang kami bawa akan lebih cepat tersambung kepada masyarakat.

Pertanyaan nomor 3 Bagaimana cara menentukan Komunikator / pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada masyarakat dalam sebuah proses komunikasi?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid menjelaskan dia dan tim pemenangan tentu tidak sembarang pilih yang akan dijadikan komunikator, tentu nya mereka juga melihat sosok seorang komunikator yang mampu secara politik dan bukan hanya secara politik tetapi dia juga bisa membidangi yang lain. Dia tentu nya juga harus bisa masuk kemana saja dan mempunyai pengalaman dibidang politik,kepemudaan,kewirausahawan yang ada sector di aceh singkil.

Pertanyaan nomor 4 Kapan saja anda dan wakil anda berkomunikasi kepada masyarakat apa isi pesan yang di sampaikan kepada masyarakat ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid menjelaskan pastinya yang dia dan tim pemenangan berkomunikasi pada waktu acara-acara kampanye damai, tetapi sehubungan kampanye damai itu. mereka harus memberanikan diri dulu.dan sebelum dia dulmusrid menjadi bupati pada waktu itu dia juga menjadi wakil bupati pada periode yang lalu . dulmusrid sungguh-sungguh membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat dan dia yakin betul dia dekat kepada msyarakat.

B. Pesan

Pertanyaan nomor 5 Bagaimana cara merancang / menyusun pesan kepada masyarakat ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid menjelaskan dia dan tim pemenangan merancang atau menyusun pesan tersebut terlebih mengevaluasi dahulu.mereka punya keyakinan bahwa pesan-pesan yang mereka sampaikan akan diterima baik oleh masyarakat aceh singkil dan mereka mengevaluasi selalu pesan-pesan sebelum mereka sampaikan kepada masyarakat.sehingga apa yang mereka sampikan itu masyarakat bisa yakin dan mempercayai mereka.

Pertanyaan nomor 6 Apa isi pesan yang disampaikan ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid menjelaskan tentu nya pesan-pesan yang baik yang mereka sampaikan dengan tidak berbelit-belit.dan yang lebih penting pesan yang mereka sampaikan itu harus sesuai

masalah yang dilapangan, tentu pesan yang bisa dipercaya oleh masyarakat dan bisa mereka mempertanggung jawabkan ketika menang nanti.

Pertanyaan nomor 7 apakah ada teknik/bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid menjelaskan teknik dan trik yang dia gunakan bersama tim pemenangan menggunakan teknik sederhana. Tetapi mereka harus membaca situasi terlebih dahulu dikarenakan di aceh singkil ada berbagai suku , ras dan agama dan bahasa.tentu mereka mengambil langkah tidak membedakan suku,ras, dan agama .sesungguhnya aceh singkil adalah daerah yang baik jauh terhadap pergesekan antara suku,ras dan agama.dan daerah aceh singkil mempunyai beberapa bahasa yaitu bahasa padang ,bahsa padang, dan bahasa singkil.

Pertanyaan nomor 8 media apa saja yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid menyampaikan media yang mereka memakai media elektronik,media cetak dan juga mereka juga bekerja sama kepada awak media local dan luar. mereka juga meminta kepada saudara-saudara yang di luar daerah agar membantu memposting dan juga mengajak mahasiswa-mahasiswa aceh singkil untuk membantu menjual diri mereka kepada masyarakat atau keluarga mereka.

Pertanyaan nomor 9 bagaimana cara menentukan media tersebut ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid menyampaikan mereka hanya meminta dan menyarankan tim pemenangan

mereka sendiri agar memilih media yang berkualitas untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada masyarakat agar bisa diterima dengan baik.

Pertanyaan nomor 10 siapa yang memilih media tersebut ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid-sazali menyampaikan tentu yang memilih media tim pemenangan mereka dan dulmusrid-sazali memilih media yang berkualitas dan bisa di percaya.

C. Komunikasikan

Pertanyaan nomor 11 siapa komunikannya / pihak yang penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** dulmusrid-sazali menjelaskan tentu nya masyarakat kab.aceh singkil yang menjadi sasaran mereka.tetapi daerah-daerah yang menurut mereka bias menghasilkan suara yang cukup dan sasaran dulmusrid –sazali yaitu lebih berfokus ke desa desa yang di luar kota singkil seperti di pulau-pulau.

Pertanyaan nomor 12 Bagaimana cara menentukan komunikannya / pihak yang penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** menjelaskan dulmusrid-sazali melihat berdasarkan data yang di bawa tim pemenangan mereka dilapangan yang meng observasi oleh tim-tim pemenangan/relawan dulmusrid-sazali.

Pertanyaan nomor 13 Kenapa memilih komunikannya tersebut / pihak yang penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** menjelaskan tentu nya dulmusrid dan sazali meng observasi dan memantau langsung ke daerah-daerah

yang menurut pantauan tim pemenangan di lapangan .daerah – daerah yang punya peluang suara yang besar untuk paslon dulmusrid-sazali.

D. Efek Umpan Balik

Pertanyaan nomor 14 Apa tanggapan masyarakat ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 1** menjelaskan bahwa tentu banyak beragam tanggapan kepada mereka yang pro atau pun kontra, dulmusrid secara personal menanggapi nya sebagai masukan yang harus dievaluasi walau pun ada yang menyerang dia secara personal , dengan kata kata tidak pantas, tetapi dulmusrid dan sazali secara personal akan menanggapi nya dengan santai dan akan memahami terlebih dahulu apa maksud dan tujuan pesan yang di sampaikan tersebut. Dulmusrid dan sazali akan mengevaluasi sungguh sungguh di karenakan kita dulmusrid dan sazali jauh-jauh hari sudah siap untuk menampung aspirasi masyarakat yang pro dan yang kontra kepada mereka . dulmusrid mengatakan sesungguhnya masyarakat adalah ujung tombak perubahan yang dia rancang bersama sazali dan tim pemenangan untuk memajukan aceh singkil yang lebih baik lagi.

Pertanyaan nomor 15 apakah tanggapan tersebut di evaluasi ?

Jawab: Berdasarkan pertanyaan tersebut **narasumber 2** menjelaskan Dulmusrid s dan sazali akan mengevaluasi dan menjadikan perbandingan saran-saran yang di dapat dari masyarakat yang pro atau pun yang kontra. dan Masukan-masukan yang di sampaikan masyarakat kepada mereka akan membuat mereka dan tim pemenangan nya extra lebih bekerja keras untuk merancang/menyusun strategi untuk memenangkan pilkada aceh singkil 2017-2022.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dikemukakan bahwa strategi komunikasi politik tim pemenangan dulmusrid-sazali dilakukan dengan pendekatan yang terdiri atas pemilihan komunikator. Berdasarkan hasil wawancara didapat dikemukakan strategi komunikasi dilakukan oleh ketua tim pemenangan dan dulmusrid hal ini menunjukkan bahwa penyampaian pesan – pesan politik untuk mempengaruhi masyarakat untuk mendukung pasangan dulmusrid-sazali tidak hanya dilakukan ketua tim pemenangan tetapi juga dilakukan oleh pasangan calon dulmusrid-sazali . pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak terlepas terhadap situasi yang ada di daerah kab. aceh singkil, tim pemenangan bekerja extra lebih keras untuk menyambungkan pesan-pesan yang disampaikan dulmusrid-sazali kepada masyarakat melalui tim pemenangan. masyarakat yang pro dan juga yang kontra akan di tampung aspirasi oleh dulmusrid- sazali melalui tim pemenangan. media yang digunakan oleh pasangan dulmusrid-sazali yaitu media cetak dan media elektronik. Cukup ampuh menyebarkan visi dan misi pasangan tersebut dan menerima aspirasi masyarakat kab. aceh singkil. Efek yang dirasakan Begitu antusias nya masyarakat kabupaten aceh singkil menantikan pemimpin yang bisa merubah daerah aceh singkil menjadi lebih baik lagi, masukan/tanggapan masyarakat kepada mereka akan mereka evaluasi sebaik mungkin guna menjadikan pelajaran kepada mereka. Sebagai tim pemenangan tugas utama yaitu selain menyampaikan visi dan misi kandidat juga menerima aspirasi atau masukan kepada mereka. berkat kerja keras

tim pemenangan pilkada kabupaten aceh singkil dulmusrid dan sazali bias duduk menjadi bupati dan wakil bupati aceh singkil tahun 2017-2022

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Yang berkomunikasi kepada masyarakat selain kandidat juga tim pemenangan .
2. Pesan yang disampaikan oleh tim pemenangan dan pasangan dulmusrid dan sazali kepada masyarakat tentu nya mudah dipahami ,mudah di mengerti, dan tidak berbelit belit pesan tersebut.dikarenakan pesan yang disampaikan harus bisa diterima oleh masyarakat.

3. Media yang dipakai oleh tim pemenangan dan pasangan dulmusrid-sazali yaitu radio ,media cetak dan sangat ampuh meyakinkan masyarakat tentang visi dan misi pasangan tersebut.
4. Tim Pemenangan pasangan dulmusrid – sazali menampung aspirasi masyarakat ketika ada sebagian masyarakat tidak pro kepada kandidat calon.

5.2. Saran

1. Hendaknya isu perubahan yang disampaikan kepada masyarakat tentu nya harus jelas.
2. Ketika pesan pesan yang di sampaikan kepada masyarakat alangkah baik nya memantau kembali apakah pesan yang disampaikan diterima atau tidak.
3. Selain media seperti radio dan cetak, sebaiknya digunakan juga media seperti facebook,instagram dll..
4. Ada nya kontra sebagian masyarakat kepada kandidat , sebagai tim pemenangan seharusnya bukan hanya mengevaluasi pesan yang disampaikan masyarakat, tetapi mengevaluasi atau mengupayakan bagaimana masyarakat yang tidak simpatik menjadi simpatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Zaafri Razaqtiar, 2016. Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon
- Arifah Nur, 2016. Menyusun Skripsi-Tesis dan Disertai lengkap dengan teknik jitu menyusun proposal agar disetujui, Yogyakarta : Araska.
- Arifin Anwar, 2011. Komunikasi Politik, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Azhar Anas Arifin, 2017. Pencitraan Politik Elektoral, Yogyakarta : Atap Buku
- Christianto Pontoh, 2015. Strategi kampanye bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten Minahasa, Jurnal Acta Diurna: Volume IV No.1

- Cangara, Hafied. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Creswell, Jhon W. 2013. Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kkuantitatif, Dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamdan Yusuf Hamdan, 2013. Teori Komunikasi, Jakarta : Salemba Humanika
- Juliyatmono - Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013, Jurnal Politik Muda: Vol. 5, No. 3
- Rakhmat jalaluddin, 2016. Metode Penelitian Komunikasi, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Mulyana, Deddy. 2014. Komunikasi Politik. Bnadung : Rosda Karya 2010. Ilmu komunikasi suatu pengantar. Bandung: Rosda Karya.
- Venus, Antar. 2009. Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan kampanye komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Yusa Djuyandi, 2017. Komunikasi politik tim pemenangan hendra hemeto dalam pemilihan ketua dpd ii partai golkar kabupaten gorontalo periode 2016–2021, Jurnal Wacana politik: Vol. 2, No. 1
- Neumann, W. Russell, The Threshold of Public Attention, Public Opinion Quarterly, 54 (1990). 599
- Oesterreich, Rainer: Handlungsregulation und Kontrolle. München: Urban & Schwarzenberg 1981.
- Sun Tzu, Wahrlich siegt, wer nicht kämpft: Die Kunst der richtigen Strategie. Verlag Hermann Bauer KG, Freiburg. ISBN 3-7626-0384-
- Salim, Agus. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Salim HS, Hairus. Fauzan, Uzair. Ibnu Sholeh, Umar. (1999). Tujuh Mesin Pendulang
- Thomas Stamford Raffles, The History of Java; Alih Bahasa : Eko Prasetyaningrum dkk, diterbitkan dalam edisi Bahasa Indonesia oleh penerbit Naasi, Yogyakarta, 2008.
- Rusli Karim M. Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah potret pasang surut, CV, Rajawali, Jakarta, 1991:50

Tzu, Sun 1983, *The Art Of Warfare*, Translated and Commentary by Roger T. Ames, New York, Balantine Books.

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung, Alfabet.

Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.